



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGARUH VARIABEL – VARIABEL MAKRO EKONOMI
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI INDONESIA**

TESIS

ANDAR ROHNAL SINAGA

6605292048

FAKULTAS EKONOMI

MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

JAKARTA

JANUARI 2010



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGARUH VARIABEL – VARIABEL MAKRO EKONOMI
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI INDONESIA**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi

ANDAR ROHNAL SINAGA

6605292048

FAKULTAS EKONOMI

MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

EKONOMI KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH

JAKARTA

JANUARI 2010

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

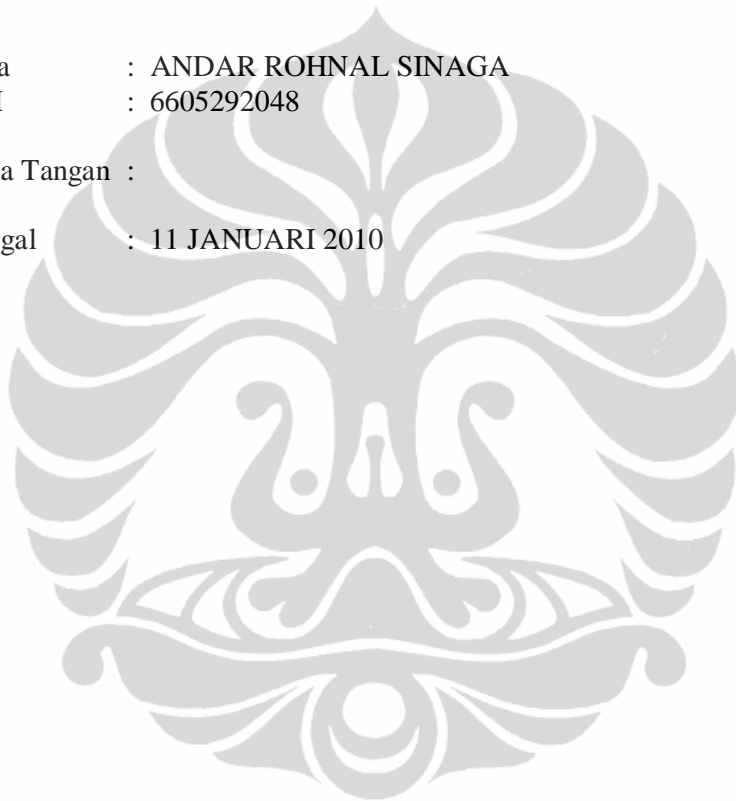
Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : ANDAR ROHNAL SINAGA

NPM : 6605292048

Tanda Tangan :

Tanggal : 11 JANUARI 2010



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : ANDAR ROHNAL SINAGA
NPM : 6605292048
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul Tesis : Pengaruh Variabel-variabel Makro Ekonomi
Terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Iman Rozani, SE., M.Soc. Sc. (.....)

Penguji : DR. Andi Fahmi Lubis, SE (.....)

Penguji : Niniek L. Gyat M. Soc. Sc. (.....)

Ditetapkan di :

Tanggal :

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Penyusunan tugas akhir dengan judul **“PENGARUH VARIABEL-VARIABEL MAKRO EKONOMI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI INDONESIA”** ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI). Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tugas akhir ini, sangatlah sulit bagi Penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Iman Rozani, SE., M.Soc. Sc. selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan saran dan bimbingan yang sangat berarti bagi Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
2. Bapak DR. Andi Fahmi Lubis, SE dan Ibu Niniek L. Gyat M. Soc. Sc. selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk penyempurnaan tugas akhir ini;
3. Para Staf Pengajar di MPKP UI yang telah membagi ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi Penulis;
4. Segenap karyawan administrasi MPKP UI yang secara langsung maupun tidak langsung turut memberikan andil dalam kegiatan Penulis selama mengikuti perkuliahan di MPKP UI;
5. Isteri dan anak-anakku yang tercinta (Monica Sianipar, Shaira Sinaga dan Aubrey Sinaga) yang senantiasa menyemangati dan memberikan motivasi dan inspirasi dalam penyelesaian tesis ini;
6. Orangtua dan mama mertua, seluruh kakak, adik, ipar dan keponakan atas segala doa dan perhatiannya selama ini;
7. Bapak Sjaiful Arief atas dukungan dan perhatiannya selama ini;
8. Teman-teman dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini.

Akhir kata, Penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu.

Semoga tugas akhir ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 11 Januari 2010

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDAR ROHNAL SINAGA
NPM : 6605292048
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Departemen : Ekonomi Keuangan Negara dan Daerah
Fakultas : Ekonomi
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“PENGARUH VARIABEL-VARIABEL MAKRO EKONOMI TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK DI INDONESIA”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Januari 2010

Yang menyatakan

(ANDAR ROHNAL SINAGA)

ABSTRAK

Nama : ANDAR ROHNAL SINAGA
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul : Pengaruh Variabel-variabel Makro Ekonomi Terhadap
Penerimaan Pajak di Indonesia

Pajak memberi kontribusi yang besar terhadap penerimaan negara. Kontribusi pajak tersebut selalu meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Mengingat pentingnya peran penerimaan pajak tersebut, perhatian terhadap penerimaan pajak selayaknya juga harus diberikan. Untuk itu, Penulis ingin mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak, baik total pajak maupun per jenis pajak. Dalam tulisan ini, Penulis membatasi pada variabel-variabel yang bersifat makro saja tanpa melihat sistem administrasi perpajakan dan kemampuan aparat perpajakan.

Dalam membahas permasalahan akan dilakukan dengan analisis regresi dengan memasukkan variabel-variabel makro ekonomi yang diduga berpengaruh terhadap penerimaan pajak ke dalam model persamaan regresi, dengan menambahkan variabel *dummy* untuk tahun 2000 akibat adanya perubahan akhir tahun anggaran. Dari hasil pembahasan dan analisis yang dilakukan, diketahui bahwa total penerimaan pajak dipengaruhi oleh perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB), nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat, nilai impor dan inflasi. Sedangkan variabel makro ekonomi yang berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) adalah PDB, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat, impor dan tingkat suku bunga, variabel makro ekonomi yang berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah PDB, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat dan inflasi. Variabel makro ekonomi yang berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah PDB, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat dan harga minyak mentah dunia.

Kata Kunci:

Variabel makro ekonomi, penerimaan pajak

ABSTRACT

Name : ANDAR ROHNAL SINAGA
Study Program : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Title : Macroeconomic Variables That Affect the Tax Revenue in
Indonesia

Tax revenue has a major contribution to state revenue. Such contribution increases from year to year in line with the increase of economic growth. As we might already know, tax revenue has an important role in state revenue, so that we have to pay attention on it. That is the reason why the Author wants to know the determinant factor of tax revenue which will affect tax revenue, either of total taxes or per type of tax. In this paper, the Author uses macro variables only, ignoring the system of tax administration and also capability of tax officer.

In this paper, the Author uses the regression analysis with macroeconomic variables which is deemed will affect the tax revenue into the regression equation model, by adding dummy variable for the year of 2000 due to a change in the end of financial year. From the discussion and analysis has been made, it is known that the total of tax revenue is affected by the growth of Gross Domestic Product (GDP), exchange rate of Rupiah against United States Dollar, value of imports and inflation. Macroeconomic variables that affect the Income Tax revenue is GDP, exchange rate of Rupiah against United States Dollar, imports and interest rate. Macroeconomic variables that affect the Value Added Tax (VAT) revenue is GDP, exchange rate of Rupiah against the United States Dollar and inflation. Macroeconomic variables that affect the Land and Building Tax revenue is GDP, exchange rate of Rupiah against the United States Dollar and price of crude oil.

Key Word:

Macroeconomic variables, tax revenue

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv-v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vi
ABSTRAK	vii-viii
DAFTAR ISI.....	ix-x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR DIAGRAM/GRAFIK.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
1.6. Sistematika Penulisan	10
2. LANDASAN TEORI	
2.1 Definisi Pajak.....	11
2.2 <i>Tax Ratio</i>	15
2.3 Pola Perkembangan Struktur Pajak.....	16
2.4 Faktor Penentu Penerimaan Pajak.....	21
3. METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Rancangan Penelitian.....	27
3.2 Identifikasi dan Defenisi Operasional Variabel.....	27
3.3 Sampel dan Metode Pengumpulan Data	29
3.4 Metode Analisis Data.....	29
3.4.1. Model dan Teknik Analisis Data.....	29
3.4.2. Pengujian Asumsi Klasik.....	37
3.4.3. Analisa Regresi.....	41
3.4.4. Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R²</i>).....	41
3.4.5. Koefisien Korelasi Parsial (<i>r²</i>).....	42
3.4.6. Uji T-Statistik.....	42
3.4.7. Uji F-Statistik.....	42

4. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Total Pajak.....	44
4.2 Pajak Penghasilan (PPH).....	47
4.3 Pajak Pertambahan Nilai dan PTLT.....	51
4.4 PBB dan BPHTB.....	54
5. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan.....	58
5.2. Saran.....	60

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perkembangan Penerimaan Pajak di Indonesia.....	2
Tabel 1.2	Pertumbuhan Penerimaan Pajak dan PDB.....	4
Tabel 1.3	Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak (Ditjen Pajak).....	5
Tabel 2.1	Struktur Pajak dan Tingkat Pendapatan Per Kapita.....	26
Tabel 4.1	Alternatif Pemilihan Model Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Total Penerimaan Pajak.....	45
Tabel 4.2	Alternatif Pemilihan Model Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.....	48
Tabel 4.3	Alternatif Pemilihan Model Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.....	51
Tabel 4.4	Alternatif Pemilihan Model Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Penerimaan PBB dan BPHTB.....	54



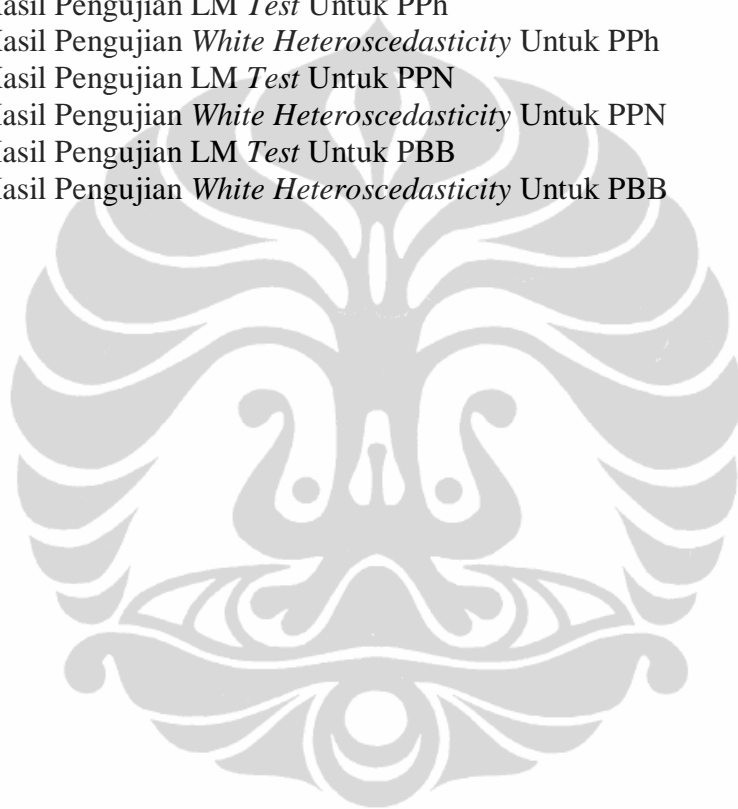
DAFTAR GRAFIK/DIAGRAM

Diagram 1.1	Rasio Pajak di Beberapa Negara Tahun 2005	7
Grafik 2.1	Pola Perkembangan Struktur Pajak.....	18



LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran 1. *Output* Hasil Regresi Model Untuk Total Pajak
- Lampiran 2. *Output* Hasil Regresi Untuk PPh
- Lampiran 3. *Output* Hasil Regresi Untuk PPN
- Lampiran 4. *Output* Hasil Regresi Untuk PBB
- Lampiran 5. Hasil Pengujian *LM Test* untuk Total Pajak
- Lampiran 6. Hasil Pengujian *White Heteroscedasticity* Untuk Total Pajak
- Lampiran 7. Hasil Pengujian *LM Test* Untuk PPh
- Lampiran 8. Hasil Pengujian *White Heteroscedasticity* Untuk PPh
- Lampiran 9. Hasil Pengujian *LM Test* Untuk PPN
- Lampiran 10. Hasil Pengujian *White Heteroscedasticity* Untuk PPN
- Lampiran 11. Hasil Pengujian *LM Test* Untuk PBB
- Lampiran 12. Hasil Pengujian *White Heteroscedasticity* Untuk PBB



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak awal tahun 1980-an, Pemerintah Indonesia tidak lagi dapat mengandalkan penerimaan negara dari sektor minyak bumi dan gas karena turunnya harga minyak internasional. Akibatnya pemerintah terpaksa mencari sumber-sumber alternatif penerimaan negara lainnya. Salah satu sumber penerimaan negara yang menjadi andalan utama pemerintah sejak saat itu adalah pajak.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak, salah satunya, ditempuh melalui reformasi perpajakan (*tax reform*) yang menyangkut sistem (*system*), aturan (*regulation*), dan juga kelembagaan (*institution*). Reformasi perpajakan ini sudah dilakukan sejak tahun 1983 dengan perubahan sistem perpajakan dari sistem *official assessment* menjadi sistem *self assessment*. Sejak reformasi perpajakan tersebut digulirkan, penerimaan pajak mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sehingga sejak tahun 2000 pajak telah memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintah. Sebagai sumber utama penerimaan negara, pajak mempunyai peran yang sangat strategis bagi kelangsungan pembangunan nasional, apalagi penerimaan pemerintah dari pajak selama ini, bahkan telah mampu membiayai kebutuhan belanja rutin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Peningkatan penerimaan pajak telah menyebabkan peranannya terhadap pembiayaan dalam APBN meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak, pada tahun 1990, peranan pajak masih sebesar 44,5% dari penerimaan dalam negeri, sementara pada tahun 2000 peranan pajak telah meningkat menjadi sebesar 55,6%. Tahun 2005, penerimaan pajak mencapai angka Rp 346,833 triliun atau sekitar 70% dari total penerimaan negara, pada tahun 2006 mencapai angka Rp 358 triliun dan pada tahun 2007, besarnya jumlah penerimaan pajak yang dikumpulkan adalah sekitar Rp 426 triliun. Dengan demikian, pertumbuhan penerimaan pajak pada tahun 2007 adalah berkisar 19%

dari penerimaan tahun sebelumnya. Bila dibandingkan dengan penerimaan pajak pada tahun 1984, yang hanya mencapai angka sekitar Rp 40 triliun, maka kenaikan penerimaan pajak telah mencapai hampir 9x lipat dalam kurun waktu 23 tahun tersebut.

Untuk lebih jelasnya perkembangan penerimaan pajak di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Perkembangan Penerimaan Pajak di Indonesia

Tahun	Penerimaan Pajak (miliar Rupiah)	Penerimaan Dalam Negeri (miliar Rupiah)	APBN (milyar Rupiah)	Penerimaan Pajak Terhadap Penerimaan Dalam Negeri (%)	Penerimaan Pajak Terhadap APBN (%)
1984/1985	3,294.6	15,905.00	19,383.00	20.71	17.00
1985/1986	5,015.4	19,252.00	22,825.00	26.05	21.97
1986/1987	5,551.0	16,141.00	21,892.00	34.39	25.36
1987/1988	6,551.8	20,803.00	26,961.00	31.49	24.30
1988/1989	9,171.0	23,004.00	32,995.00	39.87	27.80
1989/1990	12,533.4	28,740.00	38,169.00	43.61	32.84
1990/1991	17,371.5	39,546.00	49,451.00	43.93	35.13
1991/1992	20,116.1	41,585.00	51,992.00	48.37	38.69
1992/1993	24,617.8	47,452.00	58,168.00	51.88	42.32
1993/1994	30,470.3	52,280.00	62,652.00	58.28	48.63
1994/1995	37,258.1	59,737.00	69,749.00	62.37	53.42
1995/1996	41,878.1	73,013.00	82,022.00	57.36	51.06
1996/1997	50,417.2	87,630.00	99,530.00	57.53	50.66
1997/1998	62,705.8	112,275.00	112,275.00	55.85	55.85
1998/1999	87,725.8	156,408.00	172,869.00	56.09	50.75
1999/2000	110,534.2	188,427.00	220,177.00	58.66	50.20
2000	97,597.6	185,646.00	217,705.00	52.57	44.83
2001	158,579.9	286,200.00	286,200.00	55.41	55.41
2002	176,323.5	299,841.00	303,895.00	58.81	58.02
2003	204,656.7	327,834.00	327,834.00	62.43	62.43
2004	238,671.1	407,600.00	407,900.00	58.56	58.51
2005	298,500.0	493,700.00	495,000.00	60.46	60.30
2006	358,200.0	636,200.00	638,000.00	56.30	56.14
2007	425,300.0	706,100.00	707,800.00	60.23	60.09

Sumber: APBN, diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak di Indonesia selalu meningkat dari tahun ke tahun. Selain besarnya, peranannya juga meningkat

sampai sebesar 69% terhadap total penerimaan negara pada tahun 2007. Peningkatan penerimaan pajak yang terjadi sejak reformasi perpajakan tahun 1983 ini, juga diikuti oleh perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dalam kurun waktu tersebut cukup menggembirakan. Hal ini tentu sejalan dengan perkiraan secara teoritis, dimana perkembangan ekonomi memiliki korelasi yang positif terhadap penerimaan pajak. Hal ini disebabkan karena perkembangan ekonomi, secara makro, merupakan dasar bagi pengenaan pajak. Bila dasar pengenaan pajak naik, maka penerimaan pajak juga akan naik, demikian juga sebaliknya.

Secara matematis, korelasi antara penerimaan pajak dengan pertumbuhan ekonomi dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\text{Penerimaan Pajak} = f(\text{kegiatan ekonomi})$$

Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi karena semakin besar penghasilan perusahaan dan perorangan. Sedangkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi karena makin besar jumlah transaksi ekonomi yang terjadi. Sampai dengan tahun 1990 peranan penerimaan PPN masih lebih besar dari penerimaan PPh, tetapi sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, penerimaan PPh meningkat lebih cepat dari PPN sehingga sejak tahun 1991, peranan penerimaan PPh telah lebih tinggi dari penerimaan PPN dan tertinggi pada tahun 1999/2000 sebesar 65,8%. Tetapi peranan PPh tersebut justru turun pada tahun berikutnya dan relatif stabil sampai tahun 2007 pada kisaran 56-59%. Demikian juga dengan peranan PPN untuk tahun-tahun setelah 1999/2000 relatif stabil pada kisaran 34-37%. Yang meningkat justru penerimaan PBB dari 3,7% pada tahun 1999/2000 menjadi 7% pada tahun 2007.

Sejak krisis ekonomi menimpa Indonesia tahun 1997, perkembangan penerimaan pajak menjadi tidak selaras dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi. Dari data yang ada, sejak tahun 1997 telah terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, tetapi penerimaan pajak tetap tumbuh dan pertumbuhannya relatif lebih besar dari pertumbuhan penerimaan pajak sebelum

krisis ekonomi. Bahkan pada tahun 1998 ketika ekonomi menyusut sebesar 13,2%, penerimaan pajak justru tumbuh sebesar 44,4%.

Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Pertumbuhan Penerimaan Pajak dan PDB

Tahun	Penerimaan Pajak	PDB	Pertumbuhan Penerimaan Pajak	Pertumbuhan PDB
1984	3,294.60	189,120.76	-	-
1985	5,015.40	200,834.12	52.2%	6.2%
1986	5,551.00	212,633.21	10.7%	5.9%
1987	6,551.80	223,107.37	18.0%	4.9%
1988	9,171.00	236,004.08	40.0%	5.8%
1989	12,533.40	253,601.69	36.7%	7.5%
1990	17,371.50	271,714.84	38.6%	7.1%
1991	20,116.10	290,870.61	15.8%	7.0%
1992	24,617.80	309,658.14	22.4%	6.5%
1993	30,470.30	329,775.80	23.8%	6.5%
1994	37,258.10	354,640.80	22.3%	7.5%
1995	41,878.10	383,792.30	12.4%	8.2%
1996	50,417.20	413,797.30	20.4%	7.8%
1997	62,705.80	433,246.00	24.4%	4.7%
1998	87,725.80	376,051.60	39.9%	-13.2%
1999	110,534.20	376,902.50	26.0%	0.2%
2000	97,597.60	397,666.30	-11.7%	5.5%
2001	158,579.90	411,691.00	62.5%	3.5%
2002	176,323.50	426,740.50	11.2%	3.7%
2003	204,656.70	441,790.00	16.1%	3.5%
2004	238,671.10	445,674.00	16.6%	0.9%
2005	298,500.00	468,512.92	25.1%	5.1%
2006	358,200.00	474,582.14	20.0%	1.3%
2007	425,300.00	489,545.75	18.7%	3.2%

Sumber:

1. APBN diolah
2. BPS

Kondisi perekonomian Indonesia sejak krisis cenderung stagnan dan belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang ditandai dengan rendahnya angka pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini ternyata tidak membuat penerimaan pajak menurun atau stagnan juga, melainkan justru meningkat setiap tahunnya. Selain itu realisasi penerimaan pajak juga selalu lebih besar daripada target atau

rencana yang dibebankan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Tahun 1998/1999 misalnya, pada saat krisis ekonomi sedang terjadi di Indonesia, pemerintah justru menaikkan target penerimaan pajak sebesar 30% lebih dari realisasi penerimaan pajak tahun anggaran 1997/1998. Anehnya, Direktorat Jenderal Pajak yang diserahkan tugas dan wewenang untuk menghimpun penerimaan negara dari pajak, tetap saja mampu memenuhi target atau rencana yang dibebankan tersebut. Realisasi penerimaan pajak pada tahun itu mencapai Rp 87,7 triliun atau 107% dari rencana penerimaan pajak yang ditetapkan sebesar Rp 81,7 triliun. Data selengkapnya tentang rencana dan realisasi penerimaan pajak dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.3
Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak (Ditjen Pajak)

TAHUN	RENCANA (Milyar Rupiah)	REALISASI (Milyar Rupiah)	Selisih Realisasi Dengan Rencana (Milyar Rupiah)	% Realisasi Dibandingkan Rencana
				(%)
1	2	3	4 = (3-2)	5 = (3/2) * 100%
1986/1987	5,426.80	5,551.00	124.20	102.3%
1987/1988	6,541.30	6,551.80	10.50	100.2%
1988/1989	9,143.70	9,171.00	27.30	100.3%
1989/1990	11,841.60	12,533.40	691.80	105.8%
1990/1991	15,272.50	17,371.50	2,099.00	113.7%
1991/1992	17,434.50	20,116.10	2,681.60	115.4%
1992/1993	23,307.30	24,617.80	1,310.50	105.6%
1993/1994	28,215.00	30,470.30	2,255.30	108.0%
1994/1995	34,371.50	37,258.10	2,886.60	108.4%
1995/1996	38,136.50	41,878.10	3,741.60	109.8%
1996/1997	48,739.40	50,417.20	1,677.80	103.4%
1997/1998	56,144.20	62,705.80	6,561.60	111.7%
1998/1999	81,725.40	87,725.80	6,000.40	107.3%
1999/2000	92,140.50	110,534.20	18,393.70	120.0%
2000	93,978.60	97,597.60	3,619.00	103.9%
2001	156,566.90	158,579.90	2,013.00	101.3%

Sumber:

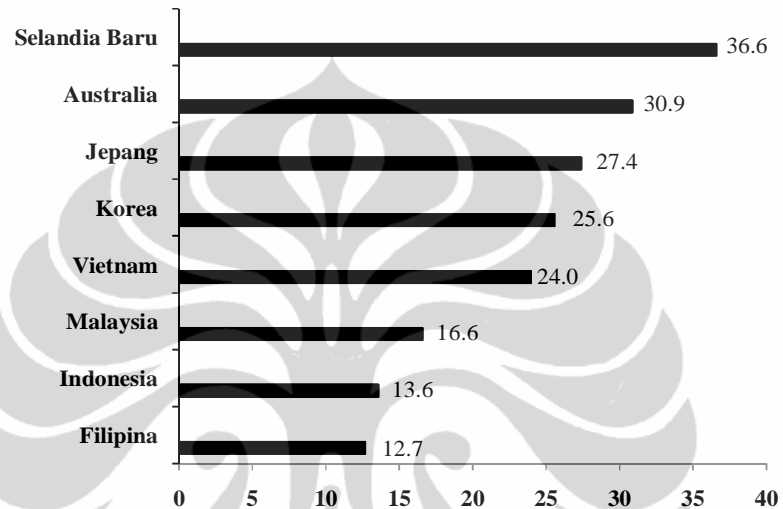
1. *Nota Keuangan dan APBN Tahun 2004, diolah*
2. *Nota Keuangan dan APBN Tahun 2001, diolah*
3. *Indikator Ekonomi, BPS, 2004*
4. *Indikator Ekonomi, BPS, 1994*
5. *Indikator Ekonomi, BPS, 1988*

Akan tetapi, meskipun target penerimaan pajak selalu tercapai dan kenaikan penerimaan pajak yang terjadi secara terus-menerus, belum dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak tersebut sudah optimal. Bagi beberapa kalangan, hal ini justru menimbulkan beberapa penafsiran bahwa sebenarnya selama ini ada potensi pajak yang belum atau tidak tergarap. Hal ini menimbulkan indikasi bahwa selama ini kinerja aparat perpajakan belum optimal. Musgrave (1969) menyatakan bahwa salah satu karakteristik yang dihadapi oleh negara sedang berkembang adalah ketidakmampuan pemerintahnya untuk mengurus administrasi perpajakannya. Akibatnya penerimaan pajak menjadi kurang optimal.

Di sisi lain, meskipun terdapat peningkatan penerimaan pajak yang signifikan, namun pengukuran dalam angka nominal tidak selalu menjadi indikasi bahwa kinerja penerimaan pajak di Indonesia telah optimal. Sunarsip dalam artikelnya “Mega Fakta dan Mega Ilusi” di Harian Republika 8 September 2004 menyatakan bahwa pengukuran berdasarkan angka nominal cenderung bias karena tidak mempertimbangkan aspek inflasi. Demikian juga Iman Sugema (Bisnis Indonesia, 23 Agustus 2004) mempertanyakan ukuran keberhasilan penerimaan pajak bila hanya berdasarkan angka penerimaan pajak. Pasalnya, menurut dia, hal itu tidak diimbangi dengan pertumbuhan *tax ratio* yang relatif konstan pada kisaran 13% dari PDB.

Tax ratio menjadi salah satu topik yang pertama dibahas apabila berbicara mengenai kinerja pemerintah, khususnya dalam hal penerimaan pajak. Sejumlah pengamat berpendapat bahwa perbandingan antara penerimaan pajak dengan PDB di Indonesia masih sangat rendah. Pada tahun 2002, *tax ratio* di Indonesia adalah sebesar 13,1%, dan dalam APBN tahun 2005, *tax ratio* menjadi sebesar 13,6%. Dengan *tax ratio* yang berada pada kisaran 13% tersebut, kinerja Pemerintah Indonesia dalam memungut pajak masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara di Eropa seperti Jerman, Italia, Swedia dan Belanda yang memiliki rasio pajak berkisar antara 30% sampai dengan 50% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia (kecuali Filipina) dan Australia saja, rasio pajak di Indonesia masih lebih rendah (lihat Diagram 1.1).

Diagram 1.1
Rasio Pajak Di Beberapa Negara Tahun 2005
 (dalam %)



Sumber: Eurostat, Nota Keuangan APBN TA 2005, UNDP, OECD, dan World Bank

Sementara itu, muncul kritik terhadap pemakaian *tax ratio* sebagai ukuran kinerja perpajakan. Iman Sugema (Tempo, 7 September 2004) mempertanyakan penerimaan pajak yang tinggi tetapi berasosiasi dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa selama Orde Baru, *tax ratio* sebesar 7,4% namun pertumbuhan ekonomi mencapai 6,1%. Saat pemerintahan Abdurrahman Wahid, *tax ratio* mencapai 10,7% dari PDB dan pertumbuhan ekonomi menurun menjadi 4,8%. Pada saat pemerintahan Megawati, ketika *tax ratio* mencapai 13,5%, pertumbuhan ekonomi justru terus turun mencapai 4,2%. Hal ini menimbulkan penafsiran di kalangan pengamat bahwa administrasi pemungutan pajak di Indonesia belum optimal.

Fenomena-fenomena tersebut di atas tentu menjadi suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih dalam tentang bagaimana sebenarnya korelasi antara pertumbuhan ekonomi Indonesia terhadap penerimaan pajak, baik penerimaan

pajak secara total maupun terhadap masing-masing jenis pajak. Selain itu, adalah penting juga untuk mengetahui variabel makro ekonomi apa saja yang memiliki korelasi terhadap penerimaan pajak, baik total maupun per jenis pajak, . Hal ini penting dalam upaya untuk dapat mengestimasi penerimaan pajak pada tingkat makro dan pengambilan kebijakan fiskal pada umumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penulisan ini, antara lain sebagai berikut :

1. Variabel makro ekonomi apa sajakah yang memiliki korelasi dengan penerimaan pajak?
2. Bagaimana korelasi antara total penerimaan pajak dengan variabel makro ekonomi dan berapa besar pengaruhnya?
3. Bagaimana korelasi antara penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dengan variabel makro ekonomi dan berapa besar pengaruhnya?
4. Bagaimana korelasi antara penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan variabel makro ekonomi dan berapa besar pengaruhnya?
5. Bagaimana korelasi antara penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan variabel makro ekonomi dan berapa besar pengaruhnya?
6. Variabel makro apakah yang lebih besar pengaruhnya terhadap penerimaan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adanya rumusan masalah di atas adalah sebagai landasan dalam menentukan tujuan penelitian dalam tesis ini. Tujuan penelitian dalam tesis ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui variabel makro ekonomi apa sajakah yang memiliki korelasi dengan penerimaan pajak.

2. Melihat bagaimana korelasi antara total penerimaan pajak dengan variabel makro ekonomi dan menghitung berapa besar pengaruhnya.
3. Melihat bagaimana korelasi antara penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dengan variabel makro ekonomi dan menghitung berapa besar pengaruhnya.
4. Melihat bagaimana korelasi antara penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan variabel makro ekonomi dan menghitung berapa besar pengaruhnya.
5. Melihat bagaimana korelasi antara penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan variabel makro ekonomi dan menghitung berapa besar pengaruhnya.
6. Untuk mengetahui variabel makro apakah yang lebih besar pengaruhnya terhadap penerimaan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penulisan ini merupakan aplikasi dari teori yang telah dipelajari oleh Penulis di bangku kuliah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para akademis yang mendalami bidang ekonomi dan perpajakan, untuk mengetahui korelasi antara penerimaan pajak dengan variabel makro ekonomi.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran atau masukan bagi Pemerintah Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Pajak dalam merumuskan atau menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia, dan juga dalam menentukan target penerimaan pajak tahun berikutnya.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan mencakup penerimaan pajak dan variabel makro ekonomi Indonesia untuk tahun 1984 sampai dengan tahun 2007 dimana reformasi perpajakan pertama kali dilakukan di Indonesia, sehingga akan dilihat bagaimana

korelasi antara penerimaan pajak dengan variabel makro ekonomi sejak Undang-undang Perpajakan tahun 1984 diberlakukan.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini disusun secara sistematika yang terdiri dari 5 (lima) bab agar diperoleh satu kesatuan uraian yang berkesinambungan sesuai dengan judul tesis ini, yaitu Pengaruh Variabel-variabel Makro Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia:

- Bab I : Merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan
- Bab II : Merupakan studi literatur tentang pengertian pajak, hubungan pajak dengan pertumbuhan ekonomi, pola perkembangan struktur pajak, dan studi-studi yang relevan dengan penelitian ini yang pernah dilakukan baik di Indonesia maupun di negara lain.
- Bab III : Menguraikan tentang metodologi penelitian yang menjelaskan tentang metode *Ordinary Least Square* (OLS) dan pengujian-pengujian asumsi klasik yang biasa dilakukan untuk menguji suatu model regresi
- Bab IV : Merupakan pembahasan dan analisis tentang hasil pengujian atas hipotesis-hipotesis awal
- Bab V : Merupakan penutup, yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran.

BAB II LANDASAN TEORI

Sebagai suatu proses dasar dalam melakukan penelitian, analisis, kajian serta pembahasan secara ilmiah, diperlukan teori-teori, konsep maupun generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan landasan teoritis yang memadai sebagai dasar berpijak dan berpikir secara sistematis dan terorganisir. Teori merupakan abstraksi yang menyatakan hubungan sistematis dari suatu gejala dan merupakan alat dari ilmu (Mohammad Nazir, 1998), sehingga teori digunakan sebagai alat atau sarana untuk mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada.

Teori dapat juga digunakan sebagai pedoman (*guideline*) dan standar (*benchmarking*), sehingga akan dapat diketahui apakah terjadi penyimpangan dari hasil yang diperoleh, atau suatu metode yang selama ini tidak pernah dipergunakan ternyata dapat digunakan. Di samping itu, adanya teori juga untuk menghindarkan kegiatan ilmiah ini dari sifat coba-coba (*trial and error*).

Adapun teori yang digunakan untuk melakukan analisis, kajian serta bahasan sesuai judul dan permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai :

2.1. Definisi Pajak

Per definisi, pajak diartikan sebagai pungutan paksa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap wajib pajak yang tidak ada kontra prestasi langsung. Oleh karena tidak ada kontra prestasi secara langsung, maka suatu pungutan pajak harus memenuhi asas-asas berikut (Rohmat Soemitro, 1990):

1. Asas Legal: Setiap pungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang. Oleh karena itu, setiap peraturan-peraturan perpajakan, baik yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, maupun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak, harus ada referensinya dalam Undang-undang.
2. Asas Kepastian Hukum: artinya bahwa ketentuan-ketentuan perpajakan tidak boleh menimbulkan keraguan-keraguan, harus jelas dan mempunyai

satu pengertian sehingga tidak dapat ditafsirkan ganda. Ketentuan-ketentuan pajak yang dapat ditafsirkan ganda akan menimbulkan celah (*loopholes*) yang dapat dimanfaatkan oleh para penyelundup pajak. Beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan kepastian hukum tersebut adalah mengenai materi obyek pajak, subyek pajak, tempat, waktu, penentuan, penyempitan/pelebaran, ruang lingkup, penggunaan bahasa hukum dan penggunaan istilah-istilah baku.

3. Asas Efisien: Pajak dipungut dari masyarakat yang kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan administrasi pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu suatu jenis pungutan pajak harus efisien, jangan sampai biaya-biaya pungutnya justru lebih besar dibandingkan dengan penerimaan pajaknya. Pada masa lalu, beberapa jenis pajak di Indonesia tidak memenuhi kriteria ini, misalnya pajak radio dan pajak kendaraan tidak bermotor. Hasil yang diperoleh dari pajak-pajak tersebut tidak seimbang dengan biaya-biaya pengumpulan yang dikeluarkannya.
4. Asas Non Distorsi: Bahwa pajak harus tidak menimbulkan distorsi dalam masyarakat, terutama distorsi ekonomi. Pengenaan pajak seharusnya tidak menimbulkan kelesuan ekonomi, misalnya alokasi sumber-sumber daya dan inflasi.
5. Asas Sederhana (*simplicity*): Hal ini berarti aturan-aturan pajak harus sederhana sehingga mudah dimengerti baik oleh fiskus maupun wajib pajak. Aturan-aturan pajak yang kompleks di samping akan sangat menyulitkan bagi pelaksana-pelaksana perpajakan, juga dapat ditafsirkan ganda sehingga dapat menimbulkan *loopholes*.
6. Asas Adil: Alokasi beban pajak pada berbagai golongan masyarakat harus mencerminkan keadilan. Ada 2 (dua) kriteria yang lazim digunakan untuk melihat apakah alokasi beban pajak telah mencerminkan aspek keadilan. Kriteria pertama adalah kemampuan membayar dari wajib pajak (*ability to pay*). Berdasarkan kriteria ini, alokasi beban pajak dikatakan adil apabila seseorang yang mempunyai kemampuan membayar pajak lebih tinggi dikenakan proporsi beban pajak yang lebih tinggi. Kriteria ke-2 (dua) adalah

prinsip benefit (*benefit principle*), yaitu benefit yang diperoleh wajib pajak dari jasa-jasa publik yang diberikan pemerintah. Berdasarkan kriteria ini, pajak dikatakan adil apabila seseorang yang memperoleh kenikmatan lebih besar daripada jasa-jasa publik yang dihasilkan oleh pemerintah dikenakan proporsi beban pajak yang lebih besar. Pajak Bumi dan Bangunan misalnya, menggunakan kriteria benefit ini untuk mengukur aspek keadilan dalam perpajakan.

Di abad 18 (delapan belas), Adam Smith dalam bukunya yang berjudul “*An inquiry into Nature and Cause of the Wealth of Nations*”, mengidentifikasi aturan perpajakan (*canons of taxation*) yang harus dipertimbangkan saat melakukan pungutan pajak, yaitu:

1. *Equality on Taxation*, yang mensyaratkan bahwa hukum pajak haruslah adil, merata dan tidak diskriminasi dalam menetapkan objek pajak, dan pembebanan kepada masing-masing subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya. Dalam perkembangannya prinsip keadilan dalam suatu sistem pajak diukur berdasarkan prinsip manfaat (*benefit principle*) yang diterima oleh masyarakat Wajib Pajak (*ability to pay principle*).

Berdasarkan kedua prinsip keadilan dalam pembebanan pajak tersebut, keadilan pajak diperinci lebih lanjut menjadi keadilan horizontal (*horizontal equity*) dan keadilan vertikal (*vertical equity*). Keadilan horizontal menganjurkan bahwa terhadap objek pajak yang sama dan terhadap Wajib Pajak yang mempunyai kemampuan yang sama harus dibebani pajak yang sama pula, sedangkan keadilan vertikal memandang suatu pembebanan pajak yang adil bilamana terhadap Wajib Pajak yang mempunyai kekayaan dan kemampuan lebih besar harus dibebani pajak lebih daripada Wajib Pajak pada umumnya. Proporsi keadilan pajak yang pertama menghasilkan kebijakan tarif proporsional (*single flat rate*) dan proporsi keadilan pajak yang kedua menghasilkan tarif pajak progresif (*differential-progressive rate*).

2. *Certainty on Taxation*, yaitu asas kepastian hukum dalam perpajakan sebenarnya berlaku pula secara universal dalam bidang hukum lainnya. Aturan hukum pajak harus secara jelas dan pasti mengatur tentang apa yang menjadi objek pajak, siapa yang menjadi subjek pajak, berapa tarif yang berlaku, bagaimana cara menghitung dan membayarnya, kapan batas waktu jatuh tempo pembayaran dan pelaporannya, dan regulasi lain yang diperlukan, sehingga tidak ada celah dan peluang mengelakkan diri dari pajak, menyelundupkan pajak serta tidak mengenal kompromi. Masalah kepastian hukum dan transparansi dalam regulasi perpajakan menjadi sangat penting bagi seluruh pelaku ekonomi sesuai dengan prinsip *self-assessment* dalam perpajakan dan meningkatkan daya saing pengusaha nasional dalam forum ekonomi global.
3. *Convenient of Payment*, menyarankan agar pembayaran pajak dipungut pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat, yang paling sesuai dan menyenangkan bagi Wajib Pajak pada umumnya. Dalam perkembangan praktek administrasi perpajakan, baik di negara maju maupun di negara berkembang dengan aspek jaminan pengamanan keuangan negara, dikenal sistem *Withholding Tax*, *Pay as You Earn (PAYE)*, *Pay as You Go* dan berbagai sistem pengenaan pajak secara final.
4. *Economist*, menyatakan bahwa pemungutan pajak harus dilakukan dengan cara efisien, dengan biaya administrasi yang hemat bagi aparat pajak, dan biaya kepatuhan yang murah bagi Wajib Pajak. Prinsip efisiensi ini juga berlaku umum bagi semua kegiatan pemerintah untuk pelayanan publik, terlebih lagi untuk para pelaku ekonomi di semua lapisan dan semua sektor.

Pajak mempunyai 2 (dua) fungsi utama, yaitu fungsi budgeter dan fungsi regulasi (Musgrave and Musgrave, 1984). Fungsi budgeter berkaitan dengan fungsi pajak sebagai alat untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang kemudian digunakan untuk membiayai administrasi pemerintahan dan kegiatan-kegiatan pembangunan.

Fungsi regulasi terutama berkaitan dengan peranan pajak dalam mengatur irama kegiatan ekonomi alokasi sumber, redistribusi pendapatan dan konsumsi. Pajak adalah salah satu alat kebijaksanaan fiskal (Nafziger, 1997) yang dapat digunakan untuk mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi melalui pasar barang (*commodity market*). Pada saat kondisi ekonomi cenderung ke arah inflasi (*overheating economy*), maka salah satu kebijaksanaan yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah kebijaksanaan fiskal yang bersifat kontraksi, yang instrumennya adalah menurunkan pengeluaran pemerintah dan/atau meningkatkan pajak. Sebaliknya apabila ekonomi sedang mengalami kelesuan, maka salah satu kebijaksanaan yang dapat diambil adalah kebijaksanaan fiskal yang bersifat ekspansif, yaitu dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah dan/atau menurunkan pajak.

2.2. Tax Ratio

Tax ratio merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat seberapa besar tingkat pemungutan pajak di suatu negara, yang dihitung dengan membandingkan besarnya penerimaan pajak dengan besarnya Produk Domestik Bruto. Penerimaan pajak tersebut dapat berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), maupun pajak-pajak lainnya.

Angka *tax ratio* yang semakin tinggi merupakan suatu indikasi dari semakin baiknya kinerja penerimaan pajak. Atau semakin besar angka *tax ratio*, semakin besar pula kemampuan suatu negara dalam menjaring penerimaan pajak. Oleh karena itu, angka rasio tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja penerimaan perpajakan, apakah sudah memadai atau belum.

Besarnya *tax ratio* dapat dihitung dengan rumus (Wibowo 2000 : 34) sebagai berikut:

$$TR_t = \frac{T_t}{PDB_t} \times 100\%$$

dimana:

TR_t = *Tax ratio* pada periode t

T_t = Penerimaan pajak pada periode t

$PDB_t =$ PDB pada periode t

Karena *tax ratio* mudah untuk dihitung, *tax ratio* menjadi indikator pertama yang dijadikan sebagai tolok ukur untuk menganalisa kinerja pemerintah khususnya yang berkaitan dengan sistem perpajakan. Namun demikian, *tax ratio* mempunyai beberapa kelemahan seperti kemungkinan adanya kesalahan statistik, pada tingkat mikro sulit untuk mencari indeks pengganti, serta bisa terjadi perubahan tiba-tiba pada faktor-faktor yang bersifat non diskrit. Selain itu *tax ratio* tidak dapat digunakan sebagai alat pembandingan kinerja pemerintah antar negara, karena tiap-tiap negara mempunyai struktur perpajakan yang berbeda.

2.3. Pola Perkembangan Struktur Pajak

Struktur pajak suatu negara/daerah menunjukkan seberapa jauh negara/daerah tersebut mengandalkan penerimaan pajaknya dari suatu jenis pajak tertentu dibandingkan dengan pajak-pajak lainnya. Struktur ini secara langsung bisa terlihat dari komposisi masing-masing penerimaan pajak terhadap total penerimaan pajaknya. Struktur pajak di negara-negara yang berkembang pada umumnya adalah ekonomi agraris, dan umumnya didominasi oleh pajak tidak langsung, yaitu pajak ekspor dan pajak impor. Hal ini disebabkan karena pajak tersebut relatif mudah diterapkan dan tidak memerlukan tenaga yang profesional dalam penerapannya. Karena itu, pajak langsung, khususnya pajak penghasilan belum mempunyai arti sebagai sumber penerimaan negara. Struktur pajak menggambarkan peranan pajak terhadap penerimaan negara. Menurut Friedlaender (1984), struktur pajak dapat bersifat regresif dan dapat pula bersifat progresif. Untuk melihat apakah struktur pajak bersifat regresif atau progresif dapat dilakukan dengan melihat perkembangan peranan pajak langsung dan pajak tidak langsung dalam penerimaan pemerintah. Bila proporsi pajak langsung dalam penerimaan pemerintah semakin besar, maka dapat diduga bahwa struktur pajak cenderung semakin progresif. Sebaliknya bila pajak tidak langsung proporsinya semakin besar dalam penerimaan pemerintah, maka struktur pajak semakin regresif. Seirama dengan perubahan struktur perekonomian nasional, maka diiringi pula oleh perubahan pada struktur perpajakan. Pajak langsung, khususnya

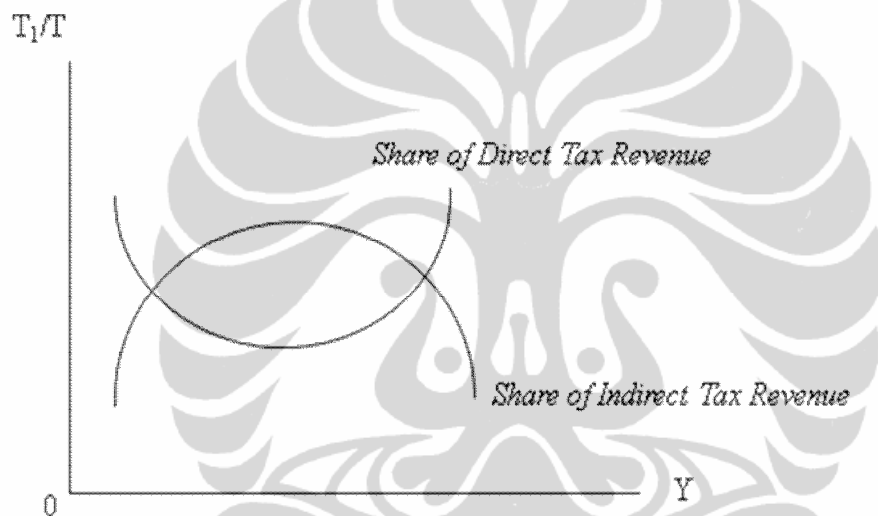
pajak penghasilan akan segera mulai memegang peranan yang cukup penting dalam penerimaan negara, sedangkan pajak tidak langsung akan berubah menjadi pajak pertambahan nilai. Menurut Musgrave (1980), terdapat hubungan antara pendapatan per kapita dengan pajak. Makin tinggi *Gross National Product* (GNP), semakin tinggi pula persentase total penerimaan pajak terhadap total GNP. Berarti bahwa dengan tingkat pendapatan per kapita penduduk Indonesia sekitar US\$ 650 pada tahun 1984, maka persentase penerimaan pajak terhadap GNP seharusnya lebih dari 16% (enam belas persen). Elastisitas penerimaan pajak terhadap perubahan dasar pajak (Produk Domestik Bruto) menggambarkan struktur pajak yang dipakai (Wirasasmita, 1994). Bagi negara-negara yang menerapkan pajak progresif terhadap pajak penghasilan, maka elastisitas penerimaan pajak lebih dari 1 (satu). Hal ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan PDB sebesar 1% (satu persen) akan mengakibatkan kenaikan penerimaan pajak lebih dari 1% (satu persen). Bila elastisitas penerimaan pajak di suatu negara lebih dari 1% (satu persen), berarti negara tersebut sudah mengarah pada kemandirian dalam pembiayaan pembangunannya.

Menurut Hinrichs (1967) dan Musgrave (1970), pola perkembangan struktur pajak suatu negara akan menyerupai huruf “U” untuk pajak langsung dan “U terbalik” untuk pajak tidak langsung. Dikatakan pajak langsung, karena beban pajaknya harus dipikul oleh subyek yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (tidak boleh dialihkan kepada pihak lain) dan pemajakannya dilakukan secara periodik, misalnya Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, sedangkan pajak tidak langsung, beban pajaknya bisa dialihkan kepada pihak lain dan pemajakannya dilakukan secara insidentil, misalnya Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa.

Pajak, baik langsung maupun tidak langsung, berhubungan erat dengan tingginya arus pendapatan nasional. Semakin tinggi arus pendapatan nasional, semakin besar pula penerimaan yang akan diperoleh dari pajak, baik pajak langsung maupun pajak tidak langsung. Pajak penghasilan (PPh) Orang Pribadi, PPh Badan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan sebagainya adalah pajak langsung yang jelas sekali berkaitan dengan tingginya arus pendapatan nasional. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM),

bea masuk, cukai dan sebagainya merupakan pajak tidak langsung yang besar penerimaannya tergantung pada tingginya transaksi atau produksi. Akan tetapi banyaknya dan tingginya produksi dan transaksi barang-barang tergantung dari daya beli masyarakat, yang artinya juga tergantung pada pendapatan nasional. Dengan demikian, jelaslah bahwa penerimaan pemerintah dari pajak berbanding lurus dengan arus pendapatan nasional.

Grafik 2.1
Pola Perkembangan Struktur Pajak



Seperti terlihat pada grafik di atas bahwa porsi (*share*) pajak langsung adalah tinggi di saat perekonomian negara/daerah belum berkembang (masih terbelakang). Kemudian porsi ini menurun dengan mulai berkembangnya perekonomian masyarakat. Penurunan ini terus berlangsung sampai pada suatu tingkat perkembangan ekonomi tertentu (pada gambar tersebut ditunjukkan oleh $Y = Y_0$), setelah itu porsi ini meningkat lagi. Porsi yang tinggi pada pajak langsung di saat Y rendah dan tinggi disebabkan oleh faktor yang berbeda. Jika di saat Y rendah jenis pajak langsung ini umumnya berbentuk *head tax/lump sum tax or poll tax*, maka pada saat Y tinggi penerimaan pajak langsung adalah dari *progressive income tax*. Di saat Y masih rendah pada umumnya kegiatan ekonomi berlangsung di “bawah tanah” (*underground*). Karena itu cara mudah bagi

pemerintah untuk mengumpulkan pajak adalah dengan mengenakan begitu saja pajak kepada setiap penduduk.

Pola perkembangan pada pajak langsung berkebalikan dengan pola perkembangan pajak tidak langsung. Awalnya porsi pajak tidak langsung ini relatif rendah, dan kemudian naik dengan berkembangnya perekonomian masyarakat. Tetapi kenaikan ini tidak akan berlangsung terus, karena pada suatu ketika kenaikan terhenti dan mulai menurun lagi. Sementara itu, porsi yang rendah pada penerimaan pajak tidak langsung di saat Y masih rendah adalah karena, seperti secara implisit dijelaskan di atas, belum cukup banyak transaksi ekonomi masyarakat yang berlangsung dalam sektor formal, sehingga pemerintah mengalami kesukaran untuk mengumpulkan penerimaan dari pajak atas transaksi ekonomi (perdagangan barang/jasa). Dengan makin berkembangnya perekonomian masyarakat maka makin banyak pula barang/jasa yang diperdagangkan, bahkan ada kecenderungan yang besar bahwa perdagangan luar negeri pun makin meningkat. Sejalan dengan ini, pemerintah mulai mengandalkan penerimaannya dari pajak atas perdagangan barang/jasa itu, terutama pajak ekspor dan impor. Namun, bila perekonomian masyarakat berkembang terus dan semakin banyak badan usaha yang bergerak di sektor formal, serta dalam rangka mengurangi rintangan-rintangan dalam perdagangan, baik perdagangan domestik maupun perdagangan luar negeri, maka pemerintah mulai memfokuskan perhatiannya pada pemungutan pajak atas penghasilan (usaha dan kerja).

Di negara-negara sedang berkembang, sebagian besar penerimaan pajaknya berasal dari sumber pajak tidak langsung. Menurut Nafziger (1990) dan Todaro (1997), proporsi PDB terhadap pajak langsung pada negara sedang berkembang lebih rendah daripada pajak langsung pada negara-negara maju. Hal ini dikarenakan pada negara-negara sedang berkembang lebih rendah golongan berpenghasilan tingginya. Dalam perkembangannya, akan terjadi proses pergeseran dari dominasi pajak tidak langsung menjadi pajak langsung sesuai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi diiringi dengan peningkatan pendapatan per kapita penduduknya.

Dalam jangka panjang, peranan pajak langsung akan semakin penting seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat dan ditunjang pula oleh

teknologi canggih menuju era globalisasi. Selain berfungsi sebagai pemerataan karena struktur tarifnya bersifat progresif, perkembangan hubungan ekonomi internasional yang semakin menuju ke arah liberal dan global mengharuskan pemerintah untuk menurunkan tarif impor dalam rangka peningkatan daya saing ekonomi domestik dalam ekonomi dunia. Konsekuensinya, penerimaan pajak tidak langsung akan menjadi turun. Alternatifnya adalah memobilisasi penerimaan pajak yang bertumpu pada pajak langsung seperti Pajak Penghasilan (Yuzral dan Makhfatih, 2000).

Tabel berikut ini menggambarkan perbandingan struktur pajak di beberapa negara dengan tingkat pendapatan per kapita yang berbeda-beda. Tingkat pendapatan per kapita dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu pendapatan rendah, pendapatan menengah dan industri. Tabel ini menjelaskan bahwa di negara-negara dengan tingkat pendapatan per kapita rendah, bagian pajak langsung lebih kecil daripada pajak tidak langsung. Bagian Pajak Penghasilan, baik *income* maupun *payroll*, meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk di suatu negara. Bagian dari *individual income tax* (di Indonesia dikenal dengan Pajak Penghasilan Orang Pribadi) turun dari 9,6% di negara-negara dengan tingkat pendapatan rendah menjadi 6,7% di negara-negara dengan tingkat pendapatan menengah, tetapi naik menjadi 26,2% di negara-negara dengan tingkat pendapatan tinggi atau negara-negara industri. Demikian juga dengan *payroll tax* (Pajak Penghasilan atas karyawan/pegawai) atau sering disebut dengan PPh Pasal 21, peranannya meningkat dari 2,2% di negara-negara dengan tingkat pendapatan rendah menjadi 10,1% di negara-negara dengan tingkat pendapatan menengah, tetapi naik menjadi 29,6% di negara-negara dengan tingkat pendapatan tinggi atau negara-negara industri.

Sebaliknya, bagian pajak tidak langsung, baik *sales tax* maupun *import taxes*, menurun seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk di suatu negara. Bagian Pajak Penjualan (PPN) mengalami penurunan dari 18,8% di negara-negara dengan tingkat pendapatan rendah menjadi 10,5% di negara-negara dengan tingkat pendapatan menengah dan kemudian naik kembali menjadi 16,6% di negara-negara dengan tingkat pendapatan tinggi atau negara-negara industri. Sedangkan bagian dari pajak atas impor mengalami penurunan yang cukup tajam

dari 32,6% di negara-negara dengan tingkat pendapatan rendah menjadi 16,2% di negara-negara dengan tingkat pendapatan menengah dan hanya 2,7% di negara-negara dengan tingkat pendapatan tinggi atau negara-negara industri.

Tabel 2.1
Struktur Pajak dan Tingkat Pendapatan Per Kapita
(1983, persentase dari total)

	Low Income	Middle Income	Industrial
Individual Income Tax	9.6	6.7	26.2
Corporate Income Tax	8.4	13.5	7.1
Property Tax	2.5	2.6	1.8
Payroll Tax	2.2	10.1	29.6
Sales tax, turnover tax, VAT	18.8	10.5	16.6
Excises	13.1	13.3	11.1
Import taxes	32.6	16.2	2.7
Export taxes	3.8	14	0.2
Total	100.0	100.0	100.0

*) *Unweighted averages of ratios for countries in the sample.*

Source: International Monetary Fund, Government Finance Statistics and The World Bank, World Development Report, 1988

2.4. Faktor Penentu Penerimaan Pajak

Penerimaan perpajak ditentukan oleh faktor internal seperti kebijakan di bidang perpajakan dan faktor eksternal seperti perkembangan ekonomi makro. Faktor internal terdiri dari Dasar Pengenaan Pajak (*Tax Base*) atau Objek Pajak. Kondisi objek pajak ditentukan berdasarkan Undang-undang. Untuk tarif pajak tertentu, kenaikan jumlah dan nilai objek pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajaknya. Faktor internal lain yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak adalah tarif pajak. Pengaruh perubahan tarif pajak terhadap penerimaan perpajakan bervariasi tergantung pada kondisi tarif itu sendiri.

Secara matematis pengaruh dari perubahan tarif tersebut dapat dinotasikan sebagai berikut:

$$T = tB$$

$$\Delta T = \Delta t.B + t. \Delta B$$

dimana :

T = Jumlah penerimaan pajak

B = Dasar Pajak

t = Tarif Pajak

Δ = Perubahan

Dari persamaan di atas dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak dapat berubah apabila tarifnya berubah atau karena dasar pajaknya yang berubah. Tarif dapat berubah hanya bila pemerintah menetapkan perubahan tarif pajak tersebut, tetapi dasar pajak dapat berubah karena peraturan pemerintah untuk memperluas dasar pajak dengan menetapkan objek pajak baru atau mengurangi dasar pajak dengan memberikan membebaskan objek pajak dari pengenaan pajak. Dalam hal aturan atau undang-undang pajaknya tetap, maka perubahan penerimaan pajak hanya disebabkan oleh naik atau turunnya nilai dari dasar pajaknya. Faktor-faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi nilai daripada dasar pajak suatu jenis pajak tergantung pada jenis pajak apakah yang akan diteliti.

Untuk jenis Pajak Penghasilan, dasar pajaknya adalah penghasilan baik perorangan maupun badan hukum. Jadi faktor-faktor apakah yang dapat mempengaruhi besar kecilnya penghasilan perorangan maupun badan hukum tentu akan mempengaruhi juga penerimaan pajak. Pada level makro, penghasilan total dari seluruh penduduk dalam sebuah negara adalah PDB dan dalam sebuah daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk jenis pajak penghasilan atas bunga deposito, dimana dasar pajaknya adalah bunga deposito, maka besar kecilnya tingkat bunga tabungan akan sangat mempengaruhi besar kecil dasar pajaknya yang secara otomatis akan mempengaruhi juga penerimaan pajak penghasilan atas bunga deposito. Untuk pajak penghasilan atas orang asing, dasar pajaknya juga ditentukan oleh nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing karena penghitungan pajak terutang atas pajak penghasilan orang asing tersebut

adalah dalam mata uang Rupiah. Untuk pajak penghasilan impor, dimana dasar pengenaan pajaknya adalah nilai impornya, maka setiap kenaikan impor yang masuk ke dalam daerah pabean (dalam hal ini Indonesia) akan meningkatkan juga penerimaan pajak penghasilan atas impor. Sedangkan untuk penerimaan PPh migas dimana dasar pajaknya adalah nilai migas yang diproduksi, maka kenaikan produksi maupun harga migas itu akan menaikkan dasar pajaknya yang secara otomatis meningkatkan penerimaan pajaknya.

Untuk Pajak Pertambahan Nilai, dimana dasar pajaknya adalah nilai transaksi atau nilai jual atas objek yang dikenakan PPN, maka dasar pajaknya akan sangat bergantung pada besar kecilnya transaksi ekonomi yang terjadi. Pada level makro transaksi ekonomi dapat diwakili oleh nilai PDB untuk ukuran negara dan PDRB untuk level daerah. Besar kecilnya transaksi atau kegiatan ekonomi pada suatu negara juga dipengaruhi oleh tingkat inflasi pada perekonomian tersebut. Pada tingkat inflasi yang moderat, perekonomian akan baik dan tumbuh, tetapi apabila tingkat inflasinya berada pada level yang terlalu tinggi, maka akan mengganggu kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Selain itu untuk PPN impor misalnya, dimana dasar pajaknya adalah nilai impor itu sendiri, maka selain ditentukan oleh volume impor, dasar pajaknya juga ditentukan oleh nilai tukar Rupiah. Hal ini disebabkan karena perhitungan pajaknya adalah dalam mata uang Rupiah.

Untuk Pajak Bumi dan Bangunan, dasar pajaknya adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)-nya yang besarnya ditentukan setahun sekali. Penentuan NJOP ini didasarkan pada perkiraan harga pasar dari objek pajaknya, dalam hal ini bumi dan bangunannya. Kenaikan harga tanah dan bangunan pada tahun tertentu ditentukan oleh perkembangan ekonomi pada daerah tersebut yang pada level makro dinyatakan dalam nilai PDB. Untuk PBB sektor pertambangan khususnya sektormigas, NJOP-nya ditentukan berdasarkan nilai dari lokasi tambang dan hasil tambang yang terkandung di dalamnya. Penentuan nilai tambang, selain dipengaruhi oleh jumlah atau kuantitas nilai tambang itu sendiri, juga dipengaruhi oleh nilai tukar Rupiah dan harga minyak mentah dunia. Variabel ini menjadi berpengaruh karena peranan penerimaan PBB dari sektor pertambangan sangat dominan terhadap total penerimaan PBB.

BPHTB dikenakan terhadap perolehan hak atas tanah dan bangunan. Besarnya penerimaan BPHTB, selain ditentukan oleh dasar pajaknya, juga ditentukan oleh seberapa sering transaksi jual beli atas tanah dan atau bangunan terjadi. Seringnya transaksi jual beli tentu saja dipengaruhi oleh tingkat perkembangan ekonomi dan tingkat pendapatan yang pada level makro dinyatakan dengan PDB.

Faktor-faktor yang disebutkan di atas merupakan faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Menurut Purwiyanto dan Tity Hernawati dalam buku “Bunga Rampai Kebijakan Fiskal beberapa variabel makro ekonomi yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak adalah, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar Rupiah, harga minyak internasional, produksi minyak mentah Indonesia, dan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Sedangkan di dalam APBN 2005 dijelaskan bahwa besaran-besaran APBN sangat terkait erat dengan beberapa indikator ekonomi makro yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI)-3 bulan, harga minyak mentah, dan tingkat produksi minyak Indonesia. Asumsi pertumbuhan ekonomi dan inflasi sangat berperan di dalam penyusunan kebutuhan prakiraan berbagai elemen APBN yang terkait erat dengan kemajuan ekonomi seperti penerimaan perpajakan. Dengan diperhitungkannya variabel makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi dalam penyusunan target penerimaan perpajakan dalam APBN, berarti pemerintah menduga bahwa variabel makro ekonomi tersebut berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Nico Jeni Yahanda juga melakukan penelitian untuk melihat pengaruh inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB), dan harga minyak internasional terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia dengan periode penelitian adalah 1998-2008. Berdasarkan hasil analisis data yang menggunakan regresi linier berganda dapat diketahui bahwa masing-masing variabel inflasi, produk domestik bruto dan harga minyak internasional memiliki pengaruh dan tanda koefisien yang sesuai dengan harapan.

Variabel inflasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Kecenderungan tersebut disebabkan karena inflasi dapat

mengubah pola alokasi faktor-faktor produksi. Perubahan ini dapat terjadi melalui sejumlah penurunan atas permintaan berbagai macam barang yang terpengaruh inflasi yang kemudian dapat mendorong terjadinya perubahan dalam produksi beberapa barang tertentu. Pengaruh kenaikan inflasi ditambah dengan panjangnya jalur distribusi akan menyebabkan harga barang dan jasa semakin meningkat, hal tersebut akan berdampak pada daya beli dan transaksi barang dan jasa yang akan menurunkan penerimaan PPN.

Variabel produk domestik bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari peningkatan PDB akan berpengaruh terhadap penerimaan negara khususnya peningkatan penerimaan di sektor perpajakan, seperti pajak-pajak yang terkait langsung terhadap barang dan jasa sebagai objeknya dalam hal ini penerimaan PPN. Kenaikan produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian akan meningkatkan penerimaan PPN karena dengan produktivitas yang meningkat, maka jumlah objek pajak (barang dan jasa kena pajak) mengalami peningkatan, dengan kata lain peningkatan barang dan jasa kena pajak memicu kenaikan penerimaan PPN.

Variabel harga minyak internasional memiliki pengaruh yang negatif terhadap penerimaan PPN. Kenaikan harga minyak internasional akan berpengaruh terhadap perekonomian dalam negeri sebagai efek inflasi yang berasal dari impor. Karena efek tersebut, biaya total produksi menjadi tinggi sehingga berpotensi menekan kinerja usaha yang berbahan baku berbasis impor. Akibatnya kenaikan harga minyak internasional menyebabkan menurunnya produksi barang dan jasa, dengan diikuti daya beli yang rendah maka menyebabkan penerimaan PPN menurun.

Gunadi dalam tulisannya yang berjudul “Rumitnya Menggapai Rencana Penerimaan Pajak” menuliskan bahwa selama ini perencanaan penerimaan pajak dari tahun ketahun dilakukan berdasarkan pendekatan inkremental karena lebih praktis dan pragmatis. Rencana penerimaan pajak suatu tahun (XI) didasarkan pada realisasi penerimaan tahun sebelumnya (X0) dengan penyesuaian terhadap (1) pertumbuhan ekonomi, (2) inflasi, (3) bunga, (4) nilai tukar, (5) harga dan

produksi migas (untuk PPh Migas), dan (6) potential gains/loss penerimaan pajak yang akan terjadi pada tahun XI.

Sementara menurut Adi Syahputra, SE, MM, Ak dalam tulisannya yang berjudul “Perpajakan” menuliskan bahwa penerimaan perpajakan, selain dipengaruhi oleh faktor internal, juga dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi makro seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar Rupiah, harga minyak internasional produksi minyak mentah Indonesia, dan tingkat suku bunga.

Sementara itu, Pemerintah Indonesia bersama-sama dengan DPR dalam menyusun APBN-P tahun 2010, dimana target pertumbuhan ekonomi dinaikkan dari 5% menjadi 5.5% juga akan menghitung ulang target penerimaan pajak akibat adanya perubahan target pertumbuhan ekonomi.

Narullita Otty Sabrina melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia Periode 1985/1986 – 2005. Di dalam penelitiannya, dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS), diketahui bahwa faktor pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi dan jumlah penduduk mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian

Penelitian dalam tugas akhir ini akan dilakukan dengan 2 (dua) metode, yaitu:

1. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang telah diolah, baik dari Biro Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI) maupun Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

2. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda.

3.2. Identifikasi dan Definisi Operasional Variabel

Berdasarkan teori-teori ekonomi maupun penelitian-penelitian sebelumnya, penulis mencoba untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Dalam APBN 2005 dijelaskan bahwa besaran-besaran APBN sangat terkait erat dengan beberapa indikator ekonomi makro yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI)-3 bulan, harga minyak mentah, dan tingkat produksi minyak Indonesia. Asumsi pertumbuhan ekonomi dan inflasi sangat berperan di dalam penyusunan kebutuhan prakiraan berbagai elemen APBN yang terkait erat dengan kemajuan ekonomi seperti penerimaan perpajakan.

Menurut Purwiyanto dan Tity Hernawati dalam buku “Bunga Rampai Kebijakan Fiskal (Bab 5 Halaman 71) beberapa variabel makro yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar Rupiah, harga minyak internasional, produksi minyak mentah Indonesia, dan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Dalam penelitian ini penulis mencoba memasukkan beberapa variabel ekonomi makro ke dalam model yang digunakan untuk melihat bagaimana

pengaruh variabel-variabel makro ekonomi tersebut terhadap penerimaan pajak. Dengan masuknya variabel ekonomi makro tersebut, diharapkan model menjadi lebih baik dan efisien. Secara keseluruhan terdapat 7 (tujuh) variabel yang digunakan, yang terdiri dari: 1 (satu) variabel terikat (*dependent variable*), dan 6 (enam) variabel bebas (*independent variable*). Variabel terikatnya adalah penerimaan pajak; variabel bebasnya adalah Produk Domestik Bruto (PDB), tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar Rupiah, nilai impor, harga minyak mentah dunia dan *dummy variable*.

Dalam penelitian ini akan dihitung korelasi antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Adapun masing-masing variabel yang digunakan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. TOTAL : Realisasi total penerimaan pajak di Indonesia yang terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dalam penelitian ini, penerimaan dari cukai, bea masuk dan pajak/pungutan ekspor maupun pajak daerah tidak masuk ke dalam total penerimaan pajak. Dengan kata lain total pajak, dalam penelitian ini adalah total pajak yang tugas dan wewenang pemungutannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
2. PPH : Realisasi penerimaan PPh yang berhasil dihimpun oleh DJP dari tahun 1984/1985 sampai dengan 2007.
3. PPN : Realisasi penerimaan PPN dan PTLL yang berhasil dihimpun oleh DJP dari tahun 1984/1985 sampai dengan 2007. Termasuk dalam PPN adalah PPnBM dan Bea Meterai.
4. PBB : Realisasi penerimaan PBB dan BPHTB yang berhasil dihimpun oleh DJP dari tahun 1984/1985 sampai dengan 2007.
5. PDB : Produk Domestik Bruto (PDB) riil. Data PDB yang digunakan adalah PDB atas dasar harga konstan tahun dasar 1993 dari tahun 1984/1985 sampai dengan 2007.

6. KURS : Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika dari tahun 1984/1985 sampai dengan 2007
7. IMPOR : Nilai impor yang masuk ke Indonesia dari tahun 1984/1985 sampai dengan 2007.
8. IR : Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia dari tahun 1984/1985 sampai dengan 2007.
9. INFLASI : Tingkat Inflasi tahunan yang terjadi di Indonesia dari tahun 1984/1985 sampai dengan 2007. Data inflasi dalam tulisan ini sudah dalam persen.
10. HARGA : Harga minyak mentah dunia dari tahun 1984/1985 sampai dengan 2000.
11. D1 : *Dummy Variable* untuk tahun 2000, dimana pada saat itu terjadi perubahan akhir tahun anggaran dari 31 Maret menjadi 31 Desember. Hal ini menyebabkan tahun anggaran 2000 hanya terdiri dari 9 bulan.

3.3. Sampel dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari tahun 1984/1985 sampai dengan data tahun 2007. Data tersebut dikumpulkan dari berbagai sumber di antaranya adalah Nota Keuangan dan APBN yang diperoleh dari Badan Analisa Fiskal (BAF) Departemen Keuangan, Laporan Tahunan Bank Indonesia dan publikasi BPS. Selain itu juga digunakan studi kepustakaan, yaitu suatu bentuk penelitian dengan cara mempelajari dan membaca berbagai bacaan atau literatur, majalah, koran, jurnal-jurnal ekonomi dan pajak yang berhubungan dengan pokok masalah dalam penelitian ini.

3.4. Metode Analisis Data

3.4.1. Model dan Teknik Analisis Data

Untuk menguji hipotesis tentang korelasi/hubungan antara variabel bebas (variabel-variabel makro ekonomi) terhadap variabel terikatnya (penerimaan pajak), penelitian ini menggunakan teknik

analisa regresi linier berganda (*multiple regression analysis model*) dengan persamaan kuadrat terkecil (*Ordinary Least Square*).

Model yang digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh variabel makro ekonomi terhadap penerimaan pajak adalah model dalam bentuk logaritma natural (Ln) dan dalam pengolahan datanya menggunakan software Eviews 4.1.

Untuk melihat pengaruh variabel makro ekonomi terhadap total penerimaan pajak digunakan model berikut:

$$\text{Ln}(\text{total}) = \alpha + \beta_1 \text{Ln}(\text{PDB}) + \beta_2 \text{Ln}(\text{kurs}) + \beta_3 \text{Ln}(\text{impor}) + \beta_4 \text{inflasi} + D_1 + \varepsilon$$

Adapun bagaimana variabel-variabel makro ekonomi tersebut mempengaruhi penerimaan pajak, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pertumbuhan ekonomi yang merupakan persentase kenaikan PDB dalam nilai riil tahun tertentu dibanding tahun sebelumnya, berpengaruh positif terhadap penerimaan perpajakan, khususnya melalui meningkatnya pendapatan masyarakat dan tingkat konsumsi. Meningkatnya pendapatan masyarakat akan meningkatkan jumlah Pajak Penghasilan yang dibayar oleh penduduk yang telah membayar pajak, dan dapat menggeser posisi penduduk tertentu dari kelompok bukan pembayar pajak menjadi pembayar pajak, atau dari pembayar pajak dengan tarif tertentu ke tarif yang lebih tinggi dalam hal tarif progresif. Sedangkan peningkatan konsumsi akibat pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan penerimaan PPN karena dasar pengenaan pajak untuk menghitung PPN adalah nilai jual atau penggantian atas transaksi ekonomi. Dengan meningkatnya konsumsi, karena tarif PPN adalah tarif tunggal, maka penerimaan PPN juga akan meningkat. Penerimaan PBB dan BPHTB juga akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi disebabkan karena semakin banyaknya transaksi jual beli atau pengalihan atas tanah dan bangunan yang menjadi dasar pengenaan

BPHTB. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan PDB berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak baik total penerimaan pajak maupun terhadap masing-masing jenis pajak.

- Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat mempunyai pengaruh yang positif terhadap penerimaan perpajakan. Untuk Pajak Penghasilan, kenaikan nilai tukar Rupiah akan meningkatkan pembayaran pajak atas penghasilan yang diterima oleh orang asing, dan pajak penghasilan dari minyak bumi dan gas (PPh migas). Sedangkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan meningkat sejalan dengan kenaikan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat terutama dari PPN impor dan PPnBM impor. Penerimaan PBB, khususnya dari sektor pertambangan, juga akan meningkat sejalan dengan kenaikan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat karena Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan PBB akan meningkat sejalan dengan kenaikan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat berpengaruh secara positif terhadap penerimaan pajak baik total maupun untuk masing-masing jenis pajak PPh, PPN maupun PBB.
- Nilai transaksi impor yang terjadi berpengaruh secara positif terhadap penerimaan pajak khususnya PPh dan PPN. Pajak Penghasilan akan naik akibat naiknya PPh impor yang dipungut atas transaksi impor yang masuk ke dalam daerah kepabeanan Indonesia. Sedangkan Pajak Pertambahan Nilai akan meningkat melalui peningkatan PPN impor yang dipungut atas transaksi impor yang masuk ke daerah kepabeanan Indonesia.

- Perubahan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia akan berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan yaitu PPh atas bunga deposito. Namun, tingginya tingkat bunga akan memiliki pengaruh negatif terhadap ekonomi secara keseluruhan dan akhirnya akan berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan. Karena rendahnya bagian PPh atas bunga deposito terhadap total penerimaan pajak maupun penerimaan PPh, maka tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia akan berpengaruh negatif terhadap total penerimaan pajak maupun penerimaan pajak penghasilan.
- Dalam periode waktu tertentu, tingkat inflasi yang tidak terlalu tinggi berpengaruh positif terhadap penerimaan perpajakan melalui naiknya nilai nominal dari pendapatan masyarakat dan konsumsi. Akan tetapi dalam jangka yang lebih panjang, tingkat inflasi yang terlalu tinggi bisa berpengaruh negatif terhadap penerimaan perpajakan melalui pengaruhnya terhadap kondisi ekonomi, sehingga secara keseluruhan penerimaan pajak akan berpengaruh negatif terhadap kenaikan inflasi.
- Harga minyak mentah dunia berpengaruh positif terhadap penerimaan perpajakan khususnya PPh migas dan PBB sektor pertambangan.

Untuk melihat pengaruh variabel makro ekonomi terhadap penerimaan Pajak Penghasilan digunakan model berikut:

$$\text{Ln(PPH)} = \alpha + \beta_1 \text{Ln(PDB)} + \beta_2 \text{Ln(kurs)} + \beta_3 \text{Ln(impor)} + \beta_4 \text{IR} + D_1 + \varepsilon$$

Bagaimana variabel-variabel makro ekonomi tersebut mempengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pertumbuhan ekonomi yang merupakan persentase kenaikan PDB dalam nilai riil tahun tertentu dibanding tahun sebelumnya, berpengaruh positif terhadap penerimaan perpajakan, khususnya melalui meningkatnya pendapatan masyarakat dan tingkat konsumsi. Meningkatnya pendapatan masyarakat akan meningkatkan jumlah Pajak Penghasilan yang dibayar oleh penduduk yang telah membayar pajak, dan dapat menggeser posisi penduduk tertentu dari kelompok bukan pembayar pajak menjadi pembayar pajak, atau dari pembayar pajak dengan tarif tertentu ke tarif yang lebih tinggi dalam hal tarif progresif.
- Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat mempunyai pengaruh yang positif terhadap penerimaan PPh. Kenaikan nilai tukar Rupiah akan meningkatkan pembayaran pajak atas penghasilan yang diterima oleh orang asing, dan pajak penghasilan dari minyak bumi dan gas (PPh migas). Selain itu kenaikan nilai tukar Rupiah juga akan menaikkan penerimaan PPh impor. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat berpengaruh secara positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan.
- Nilai transaksi impor yang masuk kedalam daerah pabean Indonesia berpengaruh secara positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan khususnya PPh impor. Pajak Penghasilan akan naik akibat naiknya nilai impor yang disebabkan oleh kenaikan nilai tukar Rupiah.
- Perubahan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia akan berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan yaitu PPh atas bunga deposito. Hal ini disebabkan karena dasar pajak atas pajak penghasilan atas bunga deposito adalah bunga deposito itu sendiri yang diterima oleh wajib pajak.

Namun, tingginya tingkat bunga akan memiliki pengaruh negatif terhadap ekonomi secara keseluruhan dan akhirnya akan berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan. Karena rendahnya bagian PPh atas bunga deposito terhadap total penerimaan pajak maupun penerimaan PPh, maka tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia akan berpengaruh negatif terhadap total penerimaan pajak maupun penerimaan pajak penghasilan.

Untuk melihat pengaruh variabel makro ekonomi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai digunakan model berikut:

$$\text{Ln(PPN)} = \alpha + \beta_1 \text{Ln(PDB)} + \beta_2 \text{Ln(kurs)} + \beta_3 \text{INFLASI} + D_1 + \varepsilon$$

Adapun bagaimana variabel-variabel makro ekonomi tersebut mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pertumbuhan ekonomi yang merupakan persentase kenaikan PDB dalam nilai riil tahun tertentu dibanding tahun sebelumnya, berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN, khususnya melalui meningkatnya pendapatan masyarakat dan tingkat konsumsi. Meningkatnya pendapatan masyarakat akan meningkatkan jumlah konsumsi dari masyarakat. Peningkatan konsumsi akibat pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan penerimaan PPN karena dasar pengenaan pajak untuk menghitung PPN adalah nilai jual atau penggantian atas transaksi ekonomi. Dengan meningkatnya konsumsi, karena tarif PPN adalah tarif tunggal, maka penerimaan PPN juga akan meningkat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan PDB berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
- Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat mempunyai pengaruh yang positif terhadap penerimaan

perpajakan. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan meningkat sejalan dengan kenaikan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat terutama dari PPN impor dan PPnBM impor karena nilai impor adalah dasar pajak dari perhitungan Pajak pertambahan Nilai yang terutang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat berpengaruh secara positif terhadap penerimaan pajak baik total maupun untuk masing-masing jenis pajak PPh, PPN maupun PBB.

- Dalam periode waktu tertentu, tingkat inflasi yang tidak terlalu tinggi berpengaruh positif terhadap penerimaan perpajakan melalui naiknya nilai nominal dari pendapatan masyarakat dan konsumsi. Akan tetapi dalam jangka yang lebih panjang, tingkat inflasi yang terlalu tinggi bisa berpengaruh negatif terhadap penerimaan perpajakan melalui pengaruhnya terhadap kondisi ekonomi, sehingga secara keseluruhan penerimaan pajak akan berpengaruh negatif terhadap kenaikan inflasi.

Untuk melihat pengaruh variabel makro ekonomi terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan digunakan model berikut:

$$\text{Ln(PBB)} = \alpha + \beta_1 \text{Ln(PDB)} + \beta_2 \text{Ln(kurs)} + \beta_3 \text{Ln(harga)} + D_1 + \varepsilon$$

Adapun bagaimana variabel-variabel makro ekonomi tersebut mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pertumbuhan ekonomi yang merupakan persentase kenaikan PDB dalam nilai riil tahun tertentu dibanding tahun sebelumnya, berpengaruh positif terhadap penerimaan PBB melalui peningkatan Nilai Jual Objek Pajaknya sebagai dasar

perhitungan PBB terutang. NJOP akan meningkat sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Penerimaan BPHTB juga akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi disebabkan karena semakin banyaknya transaksi jual beli atau pengalihan atas tanah dan bangunan yang menjadi dasar pengenaan BPHTB. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan PDB berpengaruh positif terhadap penerimaan PBB dan BPHTB

- Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat mempunyai pengaruh yang positif terhadap penerimaan PBB dan BPHTB. Penerimaan PBB, khususnya dari sektor pertambangan, juga akan meningkat sejalan dengan kenaikan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat karena Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan PBB akan meningkat sejalan dengan kenaikan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat berpengaruh secara positif terhadap penerimaan PBB dan BPHTB.
- Harga minyak mentah dunia berpengaruh positif terhadap penerimaan PBB dan BPHTB khususnya PBB sektor pertambangan.

Pemilihan model dalam bentuk logaritma adalah untuk mengurangi volatilitas data. Variabel tingkat suku bunga dan tingkat inflasi tidak dalam bentuk logaritma natural karena datanya telah dalam bentuk persentase. Adapun *expected sign* dari masing-masing variabel makro ekonomi mempengaruhi penerimaan pajak dapat disimpulkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Expected Sign Dependent Variable Terhadap
Independent Variable

	PDB	Kurs	Impor	Inflasi	IR	Harga
Total Pajak	+	+	+	(-)		
PPh	+	+			(-)	
PPN	+	+		(-)		
PBB	+	+				+

3.4.2. Pengujian Asumsi Klasik

Untuk menentukan ketepatan model regresi perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi klasik yang mendasari model regresi sebagai berikut:

1. Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah ada korelasi antara variabel-variabel bebas yang ada dalam model regresi tersebut. Model regresi yang baik adalah model yang bebas dari multikolinieritas, atau dengan kata lain model yang diantara variabel-variabel bebasnya tidak ada korelasi. Sebuah model persamaan dinyatakan terdapat gangguan multikolinieritas apabila R^2 -nya tinggi namun hanya sedikit atau bahkan tidak ada variabel bebasnya yang signifikan pada pengujian t-statistik.

Uji multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai *tolerance*-nya lebih besar dari 0,1 atau nilai VIF lebih kecil dari 10, maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi masalah multikolinieritas pada data yang akan diolah.

2. Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali: 95-96).

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya autokorelasi antara lain:

- a) data observasi dimulai pada suatu kondisi kelesuan sehingga ada data observasi selanjutnya yang naik yang dipengaruhi oleh data sebelumnya, sehingga ada kemungkinan terjadi sifat interdependensi antara data observasi tersebut.
- b) tidak dimasukkannya variabel bebas tertentu yang sebetulnya turut mempengaruhi variabel tak bebas.
- c) bentuk model yang tidak tepat.
- d) fenomena sarang laba-laba (*cobweb phenomena*)
- e) beda kala (*time lags*)
- f) adanya manipulasi data (*manipulation of data*).

Akibat dari adanya autokorelasi:

- a) Varians residual akan diperoleh lebih rendah daripada semestinya sehingga mengakibatkan R^2 lebih tinggi dari seharusnya.
- b) Pengujian hipotesis dengan menggunakan t-statistik dan F-statistik akan menyesatkan.

Untuk menguji keberadaan autokorelasi dalam penelitian ini digunakan statistik dari Durbin-Watson (DW test). Pengujian dilakukan dengan melihat nilai dari dL (angka yang diperoleh dari tabel DW batas bawah), dU (angka yang diperoleh dari tabel DW batas atas), 4-dL dan 4-dU. Jika nilainya mendekati 2 (dua) maka tidak terjadi autokorelasi, sebaliknya, jika nilainya mendekati 0 (nol) atau 4 (empat) maka terjadi autokorelasi.

Statistik d Durbin-Watson dapat digambarkan sebagai berikut:

H_0 ditolak Bukti autokorelasi positif	Daerah Keragu- raguan	H_0 diterima Tidak ada autokorelasi	Daerah keragu- raguan	H_0 ditolak Bukti autokorelasi negatif
0	dL	dU	2 - dU	4 - dL
		2	4 - dU	4

Hasil pengujian dan kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

Nilai DW berdasarkan Estimasi Model Regresi	Kesimpulan
$0 < DW < DW_L$	H_0 ditolak, terdapat autokorelasi positif
$DW_L < DW < DW_U$	Daerah Ragu-ragu
$DW_U < DW < (4 - DW_U)$	H_0 diterima, tidak terdapat autokorelasi
$(4 - DW_U) < DW < (4 - DW_L)$	Daerah Ragu-ragu
$(4 - DW_L) < DW < 4$	H_0 ditolak, terdapat autokorelasi negative

Sumber : Damodar Gujarati, *Basic Econometric*, 1995

3. Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali 2005: 105). Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Masalah heteroskedastisitas menyebabkan penaksiran koefisien regresinya tidak efisien sehingga akan jauh lebih kecil, lebih besar atau menyatukan.

Salah satu cara untuk menguji masalah heteroskedastisitas adalah dengan *white heteroscedasticity*. Dalam metode ini diasumsikan σ^2 , yang merupakan fungsi dari variabel bebas yang jika dilinearkan persamaannya akan berbentuk sebagai berikut:

$$\ln \sigma^2 = \ln \sigma^2 + \ln X_i + V_i$$

$$\ln \sigma^2 = A + B \ln X_i + V_i$$

Jika B secara statistik signifikan, maka hal ini menunjukkan kehadiran situasi heteroskedastisitas dalam data yang digunakan, sebaliknya jika B tidak signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa *disturbance term* bersifat homoskedastis.

Ada 2 (dua) cara untuk menyelesaikan masalah heteroskedastisitas, yaitu:

1. Jika σ^2 diketahui, maka cara menyelesaikannya dilakukan dengan metode *Weighted Least Square (WLS)*;
2. Jika σ^2 tidak diketahui, maka ada 4 (empat) cara transformasi datanya, tergantung pada asumsinya:
 - a) dibagi dengan X_i jika variasi kesalahan (*error variance*) diasumsikan proporsional terhadap X_i^2 .
 - b) dibagi dengan akar kuadrat X_i atau X_i jika variasi kesalahannya proporsional terhadap X_i
 - c) Asumsi variasi kesalahannya proporsional terhadap $(E(Y_i))^2$, maka dilakukan transformasi data dengan membagi persamaan dengan Y_i
 - d) dengan melakukan transformasi ke dalam bentuk log.

4. Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali 2005: 110). Suatu model regresi dikatakan memenuhi asumsi normalitas apabila data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Sebaliknya, apabila data menyebar jauh dari garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.4.3. Analisa Regresi

Setelah sebuah model regresi terbebas dari uji asumsi klasik, maka model regresi tersebut layak dipakai dan kemudian dilakukan analisis regresi. Analisis ini digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat.

3.4.4. Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui apakah ada kedekatan hubungan antara dua variabel dalam model yang dipakai. Nilai koefisien determinasi (R^2) adalah angka yang menunjukkan besarnya variasi nilai variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh persamaan model regresi yang dihasilkan. Misalnya, nilai koefisien determinasi (sering menggunakan simbol R^2) pada suatu persamaan regresi adalah 0,85. Artinya adalah variasi nilai variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas dalam persamaan model regresi tersebut adalah 85%. Sisanya, yaitu 15% variasi variabel terikat dipengaruhi oleh variabel lain yang berada di luar persamaan (model).

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan *Adjusted R²* untuk mengukur besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variasi (naik turunnya) variabel terikatnya. Pemilihan *Adjusted R²* tersebut karena adanya kelemahan pada penggunaan R^2 , yaitu bias terhadap jumlah variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model. Setiap penambahan satu variabel bebas maka R^2 pasti meningkat, tidak

peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikatnya.

3.4.5. Koefisien Korelasi Parsial (r^2)

Dalam uji regresi linier berganda dapat dianalisis besarnya koefisien korelasi parsial (r^2). Koefisien korelasi parsial (r^2) digunakan untuk mengukur derajat hubungan antara tiap variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial.

3.4.6. Uji T – Statistik

Pengujian t-statistik digunakan untuk menguji pengaruh parsial dari variabel bebas terhadap variabel tidak bebasnya. Pengujian ini dilakukan dengan hipotesa:

H_0 = Variabel bebas tidak mempengaruhi variabel tidak bebasnya

H_1 = Variabel bebas mempengaruhi variabel tidak bebasnya.

Dengan menguji 2 (dua) arah dalam tingkat signifikansi = α , dan derajat kebebasan (*degree of freedom*) $df = n - k$, dimana n = jumlah observasi dan k = jumlah parameter termasuk konstanta, maka hasil pengujian akan menunjukkan:

H_0 diterima bila $|t\text{-stat}| < t\text{-tabel}$

H_1 ditolak bila $|t\text{-stat}| > t\text{-tabel}$

3.4.7. Uji F – Statistik

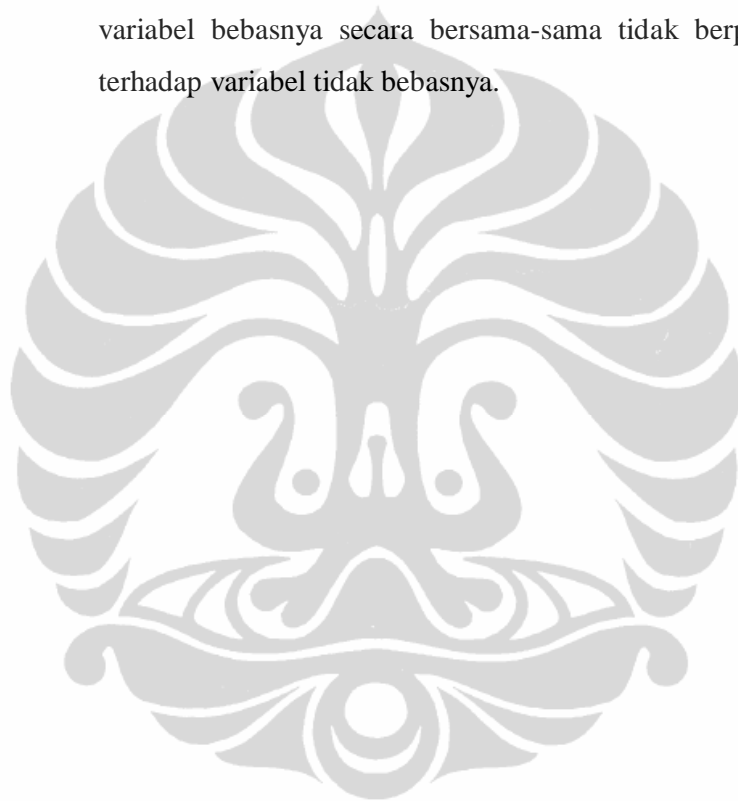
Pengujian F-statistik digunakan untuk menguji signifikansi dari semua variabel bebasnya sebagai satu kesatuan atau mengukur pengaruh variabel bebas secara bersama-sama. Hipotesa yang digunakan adalah:

H_0 = Semua variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel tidak bebasnya

H_1 = Semua variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel tidak bebasnya

Hasil pengujian adalah :

- a) apabila nilai F hitung \geq F tabel, berarti H_0 ditolak, sehingga variabel bebasnya secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel tidak bebasnya
- b) apabila nilai F hitung $<$ F tabel, berarti H_0 diterima, sehingga variabel bebasnya secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel tidak bebasnya.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Total Pajak

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan total pajak adalah total penerimaan pajak yang pemungutannya dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu akumulasi dari penjumlahan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Perkembangan total penerimaan pajak ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari Rp 3,3 triliun atau 3,8 persen terhadap PDB pada tahun 1984/1985 menjadi Rp 425,3 triliun atau 10,8 persen terhadap PDB pada tahun 2007. Dalam kurun waktu 23 tahun, total penerimaan pajak telah meningkat sebesar 128 kali.

Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa model persamaan yang digunakan untuk melihat pengaruh variabel makro ekonomi terhadap penerimaan pajak adalah model dalam bentuk logaritma natural. Penggunaan model ini sesuai dengan penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Seperti telah diungkapkan sebelumnya, variabel-variabel makro ekonomi yang diduga berpengaruh terhadap penerimaan pajak antara lain: Produk Domestik Bruto (PDB), nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat, impor, tingkat suku bunga SBI, inflasi, dan harga minyak mentah dunia. Bagaimana masing-masing variabel tersebut dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak telah dijelaskan dalam bab terdahulu.

Tahap pertama dari analisis regresi linier berganda adalah dengan mengajukan beberapa alternatif persamaan regresi untuk memilih persamaan regresi yang paling baik dan efisien. Persamaan regresi yang paling baik dan efisien adalah model yang terbebas dari asumsi *multicolinierity*, *heteroscedasticity* dan *autocorellation*. Dari hasil pemilihan model diketahui bahwa model yang terbaik untuk melihat pengaruh variabel makro ekonomi terhadap total penerimaan pajak adalah model berikut:

$$\ln(\text{total}) = \alpha + \beta_1 \ln(\text{PDB}) + \beta_2 \ln(\text{kurs}) + \beta_3 \ln(\text{impor}) + \beta_4 \text{inflasi} + D_1 + \varepsilon$$

Tabel 4.1
Alternatif Pemilihan Model Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Total Penerimaan Pajak

NO	Alternatif Persamaan Regresi	Indikasi Gangguan Asumsi
1.	$\ln(\text{total}) = c + \ln(\text{pdb}) + \ln(\text{kurs}) + \ln(\text{impor}) + \text{inflasi} + d1$	x Tidak terkena asumsi: Multicollinierity Heteroscedasticity Autocorelation
2.	$\ln(\text{total}) = c + \ln(\text{pdb}) + \text{inflasi} + \text{ir} + \ln(\text{kurs}) + \ln(\text{impor}) + \ln(\text{harga}) + \ln(\text{produksi}) + d1$	x Multicollinierity x Heteroscedasticity x Autocorelation
3.	$\ln(\text{total}) = c + \ln(\text{pdb}) + \text{inflasi} + \text{ir} + \ln(\text{kurs}) + \ln(\text{impor}) + \ln(\text{harga}) + d1$	x Multicollinierity x Heteroscedasticity x Autocorelation

Dari hasil uji asumsi *multicolineriy*, uji F-Statistic dan uji Durbin Watson yang dilakukan, model ini telah terbebas dari asumsi *multicolinerity*, *heteroscedasticity* dan *autocorellation*. Hasil pengujian dengan menggunakan uji whiteheteroscedasticity dan Breusch-Godfrey menunjukkan bahwa model tersebut telah bebas dari asumsi autocorellation dan heteroscedasticity.

Berdasarkan model di atas diketahui bahwa total penerimaan pajak dipengaruhi oleh PDB, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika, impor, dan tingkat inflasi. Kemudian analisa regresi dilakukan terhadap model tersebut dengan menggunakan program Eviews 4.1 dan output dari hasil regresi tersebut adalah sebagai berikut:

Dependent Variable: LOG(TOTAL)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-21.08266	3.109484	-6.780116	0.0000
LOG(PDB)	1.307346	0.390452	3.348293	0.0036
LOG(KURS)	1.022551	0.075697	13.50843	0.0000
LOG(IMPOR)	0.680464	0.157946	4.308215	0.0004
INFLASI	-0.011491	0.003012	-3.815570	0.0013
D1	-0.570179	0.140294	-4.064177	0.0007
Adjusted R-squared	0.992608	F-statistic		618.6952
Durbin-Watson stat	1.846425	Prob(F-statistic)		0.000000

Hasil regresi di atas menunjukkan bahwa koefisien determinasi (*adjusted R²*) sebesar 0,992608 artinya variasi nilai variabel terikat (total penerimaan pajak) yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas (PDB, kurs, tingkat bunga, dan impor) dalam persamaan model regresi tersebut adalah 99,3%. Sisanya, yaitu 0,7% variasi variabel terikat dipengaruhi oleh variabel lain yang berada di luar persamaan (model). Hasil *analysis of variance* menunjukkan nilai F-Statistic sebesar 618,6952 yang berarti bahwa semua variabel bebasnya secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya. Sedangkan hasil pengujian t-Statistic menunjukkan bahwa masing-masing variabel bebasnya memiliki pengaruh parsial yang signifikan terhadap variabel terikatnya dengan $\alpha = 1\%$. Adapun persamaan penduga garis regresi dan output analisis regresi yang paling efisien tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{Ln}(\text{total}) = -21,08 + 1,31\text{Ln}(\text{PDB}) + 1,02\text{Ln}(\text{kurs}) + 0,68\text{Ln}(\text{impor}) - 0,01\text{inflasi} - 0,57D1$$

Persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Jika faktor/variabel lain yang berpengaruh terhadap total penerimaan pajak dianggap tetap/konstan (*ceteris paribus*), pertumbuhan PDB berpengaruh secara signifikan terhadap total penerimaan pajak, dimana jika ekonomi tumbuh sebesar 1% maka total penerimaan pajak juga akan meningkat sebesar 1,31%. Hasil ini sesuai dengan teori ataupun *expected sign* yang telah ditentukan pada bagian sebelumnya dimana pertumbuhan PDB berkorelasi positif terhadap total penerimaan pajak.
2. Jika faktor/variabel lain yang berpengaruh terhadap total penerimaan pajak dianggap tetap/konstan (*ceteris paribus*), nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat berpengaruh secara signifikan terhadap total penerimaan pajak, dimana jika nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat melemah sebesar 1% maka total penerimaan pajak akan meningkat sebesar 1,02%. Hasil ini sesuai dengan teori ataupun *expected sign* yang telah ditentukan pada bagian sebelumnya dimana nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika berkorelasi positif terhadap total penerimaan pajak.

3. Jika faktor/variabel lain yang berpengaruh terhadap total penerimaan pajak dianggap tetap/konstan (*ceteris paribus*), nilai impor berpengaruh positif secara signifikan terhadap total penerimaan pajak, dimana jika nilai impor naik sebesar 1% maka total penerimaan pajak akan naik sebesar 0,68%. Hasil ini sesuai dengan teori ataupun *expected sign* yang telah ditentukan pada bagian sebelumnya dimana nilai impor berkorelasi positif terhadap total penerimaan pajak.
4. Jika faktor/variabel lain yang berpengaruh terhadap total penerimaan pajak dianggap tetap/konstan (*ceteris paribus*), inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap total penerimaan pajak, dimana jika inflasi naik sebesar 1% maka total penerimaan pajak akan turun sebesar 0,01%. Hasil ini sesuai dengan teori ataupun *expected sign* yang telah ditentukan pada bagian sebelumnya dimana tingkat inflasi berkorelasi negatif terhadap total penerimaan pajak.

Dari persamaan tersebut di atas juga diketahui bahwa pertumbuhan PDB merupakan variabel yang paling besar pengaruhnya terhadap total penerimaan pajak, kemudian nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat, nilai impor dan yang terkecil adalah inflasi.

4.2 Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah beberapa kali diubah yaitu dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991, kemudian dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008.

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan penyumbang terbesar bagi penerimaan pajak. Perkembangan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari Rp 2,1 triliun atau 2,4 persen terhadap PDB pada tahun 1984 menjadi Rp 238,4 triliun atau 6,0 persen terhadap PDB pada tahun

2007. Dalam kurun waktu 23 tahun, penerimaan PPh telah meningkat sebesar 111 kali.

Model persamaan yang terbaik dan efisien yang digunakan untuk melihat pengaruh variabel makro ekonomi terhadap penerimaan Pajak Penghasilan adalah model berikut ini

$$\text{Ln(PPH)} = \alpha + \beta_1 \text{Ln(PDB)} + \beta_2 \text{Ln(kurs)} + \beta_3 \text{Ln(impor)} + \beta_4 \text{IR} + D_1 + \varepsilon$$

Tabel 4.2
Alternatif Pemilihan Model Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

NO	Alternatif Persamaan Regresi	Indikasi Gangguan Asumsi
1.	$\text{ln(pph)} = c + \text{ln(pdb)} + \text{ln(kurs)} + \text{ln(impor)} + \text{ir} + d1$	x Tidak terkena asumsi: Multicollinierity Heteroscedasticity Autocorelation
2.	$\text{ln(pph)} = c + \text{ln(pdb)} + \text{inflasi} + \text{ir} + \text{ln(kurs)} + \text{ln(impor)} + \text{ln(harga)} + \text{ln(produksi)} + d1$	x Multicollinierity x Heteroscedasticity x Autocorelation
3.	$\text{ln(pph)} = c + \text{ln(pdb)} + \text{inflasi} + \text{ir} + \text{ln(kurs)} + \text{ln(impor)} + \text{ln(harga)} + d1$	x Multicollinierity x Heteroscedasticity x Autocorelation

Dari hasil uji asumsi *multicollinierity*, uji F-Statistic dan uji Durbin Watson yang dilakukan, model ini telah terbebas dari asumsi *multicollinierity*, *heteroscedasticity* dan *autocorellation*. Hasil pengujian dengan menggunakan uji *whiteheteroscedasticity* dan Breusch-Godfrey menunjukkan bahwa model tersebut telah bebas dari asumsi *autocorellation* dan *heteroscedasticity*

Dalam model ini, variabel makro ekonomi yang berpengaruh terhadap penerimaan PPh adalah PDB, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika, impor dan tingkat suku bunga SBI. Hasil regresi atas model tersebut menghasilkan output sebagai berikut:

Dependent Variable: LOG(PPH)				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-23.25161	3.126198	-7.437663	0.0000
LOG(PDB)	1.410352	0.391968	3.598129	0.0021
LOG(KURS)	1.029919	0.067623	15.23038	0.0000
LOG(IMPOR)	0.701466	0.160262	4.377009	0.0004
IR	-0.010115	0.003272	-3.091537	0.0063
D1	-0.461405	0.135134	-3.414426	0.0031
Adjusted R-squared	0.993422	F-statistic	695.7324	
Durbin-Watson stat	1.885566	Prob(F-statistic)	0.000000	

Hasil regresi di atas menunjukkan bahwa koefisien determinasi (adjusted R²) sebesar 0,993422 artinya variasi nilai variabel terikat (penerimaan PPh) yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas (PDB, kurs, nilai impor, dan inflasi) dalam persamaan model regresi tersebut adalah 99,3%. Sisanya, yaitu 0,7% variasi variabel terikat dipengaruhi oleh variabel lain yang berada di luar persamaan (model). Hasil *analysis of variance* menunjukkan nilai F-Statistic sebesar 695,7324 yang berarti bahwa semua variabel bebasnya secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya. Sedangkan hasil pengujian t-Statistic menunjukkan bahwa masing-masing variabel bebasnya memiliki pengaruh parsial yang signifikan terhadap variabel terikatnya dengan α sebesar 1%.

Berdasarkan hasil regresi tersebut dapat dibentuk persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Ln(PPh)} = -23.25 + 1.41\text{Ln(PDB)} + 1.03\text{ln(kurs)} + 0.70\text{Ln(impor)} - 0,01\text{IR} - 0,46\text{D1}$$

Persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Jika faktor/variabel lain yang berpengaruh terhadap penerimaan PPh dianggap tetap/konstan (*ceteris paribus*), pertumbuhan PDB berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPh, dimana jika PDB tumbuh sebesar 1% maka penerimaan PPh juga akan meningkat sebesar 1,41%. Hasil ini sesuai dengan teori ataupun *expected sign* yang telah ditentukan pada bagian

sebelumnya dimana tingkat pertumbuhan PDB berkorelasi positif terhadap penerimaan PPh.

2. Jika faktor/variabel lain yang berpengaruh terhadap penerimaan PPh dianggap tetap/konstan (*ceteris paribus*), nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPh, dimana jika nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat melemah sebesar 1% maka penerimaan PPh akan meningkat sebesar 1,03%. Hasil ini sesuai dengan teori ataupun *expected sign* yang telah ditentukan pada bagian sebelumnya dimana nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat berkorelasi positif terhadap penerimaan PPh.
3. Jika faktor/variabel lain yang berpengaruh terhadap penerimaan PPh dianggap tetap/konstan (*ceteris paribus*), nilai impor berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPh, dimana jika impor naik sebesar 1% maka penerimaan PPh juga akan meningkat sebesar 0.70%. Hasil ini sesuai dengan teori ataupun *expected sign* yang telah ditentukan pada bagian sebelumnya dimana nilai impor berkorelasi positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh).
4. Jika faktor/variabel lain yang berpengaruh terhadap penerimaan PPh dianggap tetap/konstan (*ceteris paribus*), tingkat suku bunga berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penerimaan PPh, dimana jika tingkat suku bunga naik sebesar 1% maka penerimaan PPh akan turun sebesar 0.01%. Hasil ini sesuai dengan teori ataupun *expected sign* yang telah ditentukan pada bagian sebelumnya dimana tingkat suku bunga berkorelasi negatif terhadap penerimaan PPh.

Dari persamaan tersebut di atas juga diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan variabel yang paling besar pengaruhnya terhadap penerimaan PPh, kemudian nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat, nilai impor dan yang terkecil adalah tingkat suku bunga SBI.

4.3 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL)

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah diatur dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) merupakan penyumbang terbesar kedua bagi penerimaan pajak setelah PPh. Perkembangan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari Rp 993 miliar atau 1,1 persen terhadap PDB pada tahun 1984 menjadi Rp 157,2 triliun atau 4,0 persen terhadap PDB pada tahun 2007. Dalam kurun waktu 23 tahun, penerimaan PPN dan PTLL meningkat rata-rata 157 kali per tahun.

Model persamaan yang terbaik dan efisien yang digunakan untuk melihat pengaruh variabel makro ekonomi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya adalah model berikut:

$$\text{Ln(PPN)} = \alpha + \beta_1 \text{Ln(PDB)} + \beta_2 \text{Ln(kurs)} + \beta_3 \text{INFLASI} + D_1 + \varepsilon$$

Tabel 4.3
Alternatif Pemilihan Model Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

NO	Alternatif Persamaan Regresi	Indikasi Gangguan Asumsi
1.	$\ln(\text{ppn}) = c + \ln(\text{pdb}) + \ln(\text{kurs}) + \text{inflasi} + d1$	x Tidak terkena asumsi: Multicollinierity Heteroscedasticity Autocorelation
2.	$\ln(\text{ppn}) = c + \ln(\text{pdb}) + \text{inflasi} + \text{ir} + \ln(\text{kurs}) + \ln(\text{impor}) + \ln(\text{harga}) + \ln(\text{produksi}) + d1$	x Multicollinierity x Heteroscedasticity x Autocorelation
3.	$\ln(\text{ppn}) = c + \ln(\text{pdb}) + \text{inflasi} + \text{ir} + \ln(\text{kurs}) + \ln(\text{impor}) + \ln(\text{harga}) + d1$	x Multicollinierity x Heteroscedasticity x Autocorelation

Dari hasil uji asumsi *multicolinieriy*, uji F-Statistic dan uji Durbin Watson yang dilakukan, model ini telah terbebas dari asumsi *multicolinierity*, *heteroscedasticity* dan *autocorellation*. Hasil pengujian dengan menggunakan uji *white*

heteroscedasticity dan Breusch-Godfrey menunjukkan bahwa model tersebut telah bebas dari asumsi *autocorellation* dan *heteroscedasticity*.

Dalam model ini, variabel makro ekonomi yang berpengaruh terhadap penerimaan PPN dan PTLL adalah PDB, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika, dan inflasi. Diketahui juga bahwa variabel impor yang berpengaruh terhadap total penerimaan pajak dan Pajak Penghasilan, ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini dapat disebabkan karena kecilnya peranan penerimaan PPN impor terhadap penerimaan PPN secara keseluruhan. Dapat juga dikatakan bahwa peranan penerimaan pajak perdagangan internasional masih kecil dibandingkan dengan perdagangan dalam negeri.

Hasil regresi atas model tersebut menghasilkan output sebagai berikut:

Dependent Variable: LOG(PPN)				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-32.59881	3.139889	-10.38216	0.0000
LOG(PDB)	2.881237	0.306557	9.398706	0.0000
LOG(KURS)	0.725393	0.122427	5.925108	0.0000
INFLASI	-0.012955	0.005470	-2.368359	0.0286
D1	-0.561569	0.255297	-2.199668	0.0404
Adjusted R-squared	0.971645	F-statistic		198.0357
Durbin-Watson stat	1.007476	Prob(F-statistic)		0.000000

Hasil regresi di atas menunjukkan bahwa koefisien determinasi (*adjusted R²*) sebesar 0.971645 artinya variasi nilai variabel terikat (penerimaan PPN dan PTLL) yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas (PDB, kurs, dan inflasi) dalam persamaan model regresi tersebut adalah 97.2%. Sisanya, yaitu 2.8 variasi variabel terikat dipengaruhi oleh variabel lain yang berada di luar persamaan (model). Hasil *analysis of variance* menunjukkan nilai F-Statistic sebesar 198.0375 yang berarti bahwa semua variabel bebasnya secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya. Sedangkan hasil pengujian t-Statistic menunjukkan bahwa masing-masing variabel bebasnya memiliki pengaruh parsial yang signifikan terhadap variabel terikatnya dengan α sebesar 5%.

Berdasarkan hasil regresi tersebut dapat dibentuk persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Ln(PPN)} = -32.60 + 2.88\text{Ln(PDB)} + 0.73\text{Ln(KURS)} - 0,01\text{inflasi} - 0,56\text{D1}$$

Persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Jika faktor/variabel lain yang berpengaruh terhadap penerimaan PPN dan PTLL dianggap tetap/konstan (*ceteris paribus*), pertumbuhan PDB berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN dan PTLL, dimana jika PDB tumbuh sebesar 1% maka penerimaan PPN dan PTLL juga akan meningkat sebesar 2.88%. Hasil ini sesuai dengan teori ataupun *expected sign* yang telah ditentukan pada bagian sebelumnya dimana pertumbuhan PDB berkorelasi positif terhadap penerimaan PPh.
2. Jika faktor/variabel lain yang berpengaruh terhadap penerimaan PPN dan PTLL dianggap tetap/konstan (*ceteris paribus*), nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN dan PTLL, dimana jika nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat melemah sebesar 1% maka penerimaan PPN dan PTLL akan meningkat sebesar 0.73%. Hasil ini sesuai dengan teori ataupun *expected sign* yang telah ditentukan pada bagian sebelumnya dimana nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat berkorelasi positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh).
3. Jika faktor/variabel lain yang berpengaruh terhadap penerimaan PPN dan PTLL dianggap tetap/konstan (*ceteris paribus*), tingkat suku bunga berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penerimaan PPN dan PTLL, dimana jika tingkat suku bunga naik sebesar 1% maka penerimaan PPN dan PTLL akan turun sebesar 0,01%. Hasil ini sesuai dengan teori ataupun *expected sign* yang telah ditentukan pada bagian sebelumnya dimana tingkat suku bunga berkorelasi negatif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh).

Dari persamaan tersebut di atas juga diketahui bahwa PDB merupakan variabel yang paling besar pengaruhnya terhadap penerimaan PPN dan PTLL, kemudian nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat dan yang terkecil adalah tingkat bunga.

4.4 PBB dan BPHTB

Yang dimaksud dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak atas bumi dan bangunan. PBB diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994. Sementara itu, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. BPHTB pertama kali dikenakan pada tahun 1998 berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000.

PBB dan BPHTB, pada tahun 2007, menyumbang sekitar 7% dari total penerimaan pajak. Perkembangan penerimaan pajak ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari Rp 180,6 miliar atau 0,2 persen terhadap PDB pada tahun 1984 menjadi Rp 29,7 triliun atau 0,8 persen terhadap PDB pada tahun 2007. Dalam kurun waktu 23 tahun penerimaan PBB dan BPHTB meningkat 163 kali.

Model terbaik dan efisien yang dapat digunakan untuk melihat pengaruh variabel makro ekonomi terhadap penerimaan PBB dan BPHTB adalah model

$$\ln(\text{PBB}) = \alpha + \beta_1 \ln(\text{PDB}) + \beta_2 \ln(\text{kurs}) + \beta_3 \ln(\text{harga}) + D_1 + \varepsilon$$

Tabel 4.4
Alternatif Pemilihan Model Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Penerimaan PBB dan BPHTB

NO	Alternatif Persamaan Regresi	Indikasi Gangguan Asumsi
1.	$\ln(\text{pbb}) = c + \ln(\text{pdb}) + \ln(\text{kurs}) + \ln(\text{harga}) + d1$	x Tidak terkena asumsi: Multicollinierity Heteroscedasticity Autocorelation
2.	$\ln(\text{pbb}) = c + \ln(\text{pdb}) + \text{inflasi} + \text{ir} + \ln(\text{kurs}) + \ln(\text{impor}) + \ln(\text{harga}) + \ln(\text{produksi}) + d1$	x Multicollinierity x Heteroscedasticity x Autocorelation
3.	$\ln(\text{pbb}) = c + \ln(\text{pdb}) + \text{inflasi} + \text{ir} + \ln(\text{kurs}) + \ln(\text{impor}) + \ln(\text{harga}) + d1$	x Multicollinierity x Heteroscedasticity x Autocorelation

Dari hasil uji asumsi *multicolinieriy*, uji F-Statistic dan uji Durbin Watson yang dilakukan, model ini telah terbebas dari asumsi *multicolinierity*,

heteroscedasticity dan *autocorellation*. Hasil pengujian dengan menggunakan uji whiteheteroscedasticity dan Breusch-Godfrey menunjukkan bahwa model tersebut telah bebas dari asumsi autocorellation dan heteroscedasticity.

Berdasarkan model di atas diketahui bahwa penerimaan PBB dan BPHTB dipengaruhi oleh PDB, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat, dan harga minyak mentah dunia. Harga minyak mentah dunia berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PBB dan BPHTB, seperti telah diungkapkan pada bagian sebelumnya, disebabkan karena penerimaan PBB dari sektor pertambangan migas sangat dominan dalam penentu penerimaan PBB secara keseluruhan. Besarnya PBB dari sektor pertambangan migas ditentukan dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)-nya dalam hal ini adalah lokasi tambangnya. Bila harga minyak mentah dunia naik, tentu saja NJOP-nya akan naik dan besarnya PBB yang terutang juga akan naik. Demikian sebaliknya, jika harga minyak mentah dunia turun maka NJOP-nya juga akan turun dan PBB terutang-nya juga akan turun.

Output dari regresi linier berganda model 10 di atas adalah:

Dependent Variable: LOG(PBB)				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-37.90736	1.973214	-19.21097	0.0000
LOG(PDB)	2.987219	0.190783	15.65769	0.0000
LOG(KURS)	0.639961	0.069173	9.251535	0.0000
LOG(HARGA)	0.751645	0.078679	9.553303	0.0000
D1	-0.476330	0.152871	-3.115892	0.0057
Adjusted R-squared	0.991334	F-statistic	658.7684	
Durbin-Watson stat	1.112518	Prob(F-statistic)	0.000000	

Hasil regresi di atas menunjukkan bahwa koefisien determinasi (*adjusted R²*) sebesar 0.991334 artinya variasi nilai variabel terikat (penerimaan PBB dan BPHTB) yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas (PDB, kurs, dan harga minyak mentah dunia) dalam persamaan model regresi tersebut adalah 99.1%. Sisanya, yaitu 0.9% variasi variabel terikat dipengaruhi oleh variabel lain yang berada di luar persamaan (model). Hasil *analysis of variance* menunjukkan nilai F-Statistic sebesar 658.7684 yang berarti bahwa semua variabel bebasnya secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya. Sedangkan hasil pengujian t-Statistic menunjukkan bahwa masing-masing

variabel bebasnya memiliki pengaruh parsial yang signifikan terhadap variabel terikatnya dengan α sebesar 5%.

Berdasarkan hasil regresi tersebut dapat dibentuk persamaan regresi sebagai berikut:

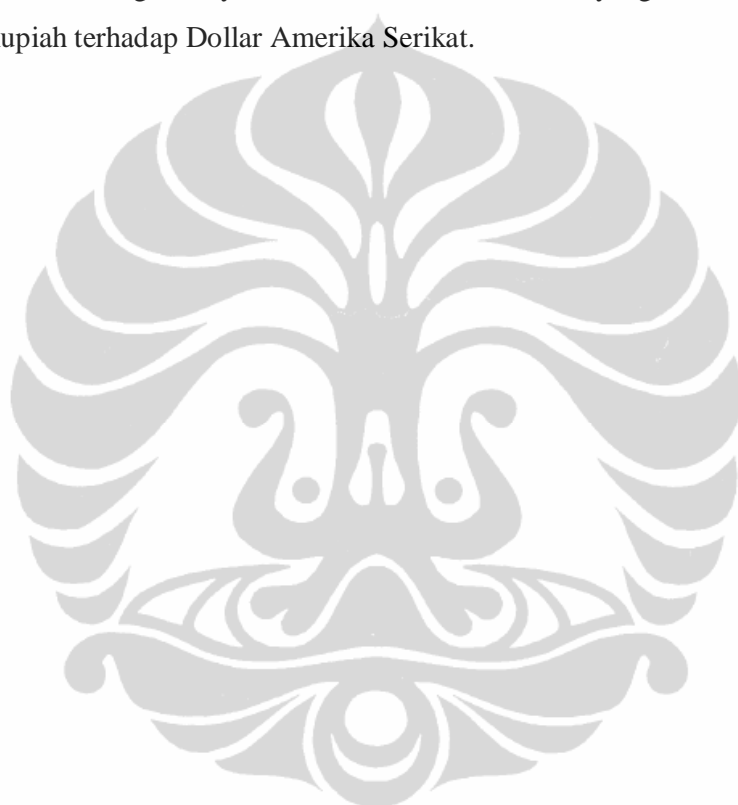
$$\text{Ln(PBB)} = -37.91 + 2.99\text{Ln(PDB)} + 0.64\text{Ln(KURS)} + 0.75\text{Ln(Harga)} - 0.48D1$$

Persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Jika faktor/variabel lain yang berpengaruh terhadap penerimaan PBB dan BPHTB dianggap tetap/konstan (*ceteris paribus*), pertumbuhan PDB berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PBB dan BPHTB, dimana jika PDB tumbuh sebesar 1% maka penerimaan PBB dan BPHTB juga akan meningkat sebesar 2.99%. Hasil ini sesuai dengan teori ataupun *expected sign* yang telah ditentukan pada bagian sebelumnya dimana pertumbuhan PDB berkorelasi positif terhadap penerimaan PBB dan BPHTB.
2. Jika faktor/variabel lain yang berpengaruh terhadap penerimaan PBB dan BPHTB dianggap tetap/konstan (*ceteris paribus*), nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PBB dan BPHTB, dimana jika nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat melemah sebesar 1% maka penerimaan PBB dan BPHTB akan meningkat sebesar 0.64%. Hasil ini sesuai dengan teori ataupun *expected sign* yang telah ditentukan pada bagian sebelumnya dimana nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat berkorelasi positif terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
3. Jika faktor/variabel lain yang berpengaruh terhadap penerimaan PBB dan BPHTB dianggap tetap/konstan (*ceteris paribus*), harga minyak mentah internasional berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerimaan PBB dan BPHTB, dimana jika harga minyak mentah internasional naik sebesar 1% maka penerimaan PBB dan BPHTB akan turun sebesar 0.75%.

Hasil ini sesuai dengan teori ataupun *expected sign* yang telah ditentukan pada bagian sebelumnya dimana harga minyak mentah dunia berkorelasi positif terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dari persamaan tersebut di atas juga diketahui bahwa pertumbuhan PDB merupakan variabel yang paling besar pengaruhnya terhadap penerimaan PBB dan BPHTB, kemudian harga minyak mentah internasional dan yang terkecil adalah nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat.



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dalam tulisan ini, yaitu antara lain:

1. Variabel makro ekonomi yang berpengaruh terhadap total penerimaan pajak adalah Produk Domestik Bruto (PDB), nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika, nilai impor dan inflasi.
2. Respon total penerimaan pajak terhadap perubahan PDB sebesar 1% adalah 1.31%
3. Respon total penerimaan pajak terhadap pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika sebesar 1% adalah 1.02%.
4. Respon total penerimaan pajak terhadap nilai impor sebesar 1% adalah 0.68%.
5. Respon total penerimaan pajak terhadap tingkat inflasi sebesar 1% adalah -0.01%.
6. Variabel makro ekonomi yang berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan adalah Produk Domestik Bruto (PDB), nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika, nilai impor dan tingkat suku bunga SBI.
7. Respon penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap perubahan PDB sebesar 1% adalah 1.42%
8. Respon penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap perubahan nilai tukar Rupiah sebesar 1% adalah 1.03%
9. Respon penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap perubahan nilai impor sebesar 1% adalah 0.70%
10. Respon penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap tingkat bunga SBI sebesar 1% adalah -0.01%.

11. Variabel makro ekonomi yang berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai adalah Produk Domestik Bruto (PDB), nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika, nilai impor dan inflasi.
12. Respon penerimaan PPN terhadap perubahan PDB sebesar 1% adalah 2.88%.
13. Respon penerimaan PPN terhadap pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika adalah 0.73%,
14. Respon penerimaan PPN terhadap perubahan tingkat inflasi sebesar 1% adalah -0.01%.
15. Variabel makro ekonomi yang berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah Produk Domestik Bruto (PDB), nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika, dan harga minyak mentah dunia.
16. Respon penerimaan PBB dan BPHTB terhadap perubahan PDB sebesar 1% adalah 2.99%.
17. Respon penerimaan PBB dan BPHTB terhadap perubahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika sebesar 1% adalah 0.64%.
18. Respon penerimaan PBB dan BPHTB terhadap perubahan harga minyak mentah dunia sebesar 1% adalah 0.75%.

5.2. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas diketahui bahwa respon total penerimaan pajak terhadap pertumbuhan PDB masih rendah (1.31%). Oleh sebab itu disarankan agar angka ini dapat ditingkatkan, sehingga kedepannya respon penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi dapat lebih besar lagi. Hal ini penting karena semakin besar respon penerimaan pajak terhadap pertumbuhan PDB, maka peningkatan penerimaan pajak akan semakin besar pada tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu. Usaha-usaha untuk meningkatkan respon tersebut antara lain dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas sdm aparat perpajakan maupun perbaikan administrasi perpajakan.

Berdasarkan pada hasil kesimpulan, dapat diketahui bahwa variabel makro ekonomi yang paling berpengaruh terhadap penerimaan pajak adalah pertumbuhan PDB. Oleh sebab itu, untuk menjaga agar penerimaan pajak tetap dapat tercapai maka disarankan agar pertumbuhan ekonomi harus tetap terjaga karena apabila pertumbuhan ekonomi menurun, sesuai dengan kesimpulan dalam tulisan ini, maka akan berdampak pada penurunan penerimaan pajak. Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, disarankan juga agar stabilitas indikator atau variabel ekonomi makro terutama yang berpengaruh kepada penerimaan pajak tetap dijaga demi tercapainya penerimaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Musgrave, Richard A., and Peggy B. Musgrave. Public Finance in Theory and Practice. McGraw Hill Book Company, 1989.

Eviews User's Guide. 2nd Edition. Quantitative Micro Software. United States of America, 1998.

Todaro, Michael P., & Smith, Stephen. Economic Development, 7th ed., United States : Addison Wesley, 2000.

Zain, Mohammad. Manajemen Perpajakan, Jakarta : Penerbit Salemba Empat, 2003.

Gujarati, Damodar, "Basic Econometrics", fourth edition, United States Military Academy, North America, 2003.

Rozani, Iman, "Materi Kullah Ekonomi Publik". MPKP FE-UI, Depok, 2004

N. Gregory Mankiw, "Teori Ekonomi Makro", edisi kelima, Harvard University

Dornbusch, Rudiger & Stanley Fischer, "Makro Ekonomi," Edisi keempat, Erlangga

Blanchard Oliver, "Macroeconomics," International Edition, Prentice Hall International, 1997

ARTIKEL:

Syahputra Edy, "Perpajakan," Fakultas Ekonomi USU, 2006

Nico Jeni Yahanda, "Analisis Pengaruh Inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB) dan Harga Minyak Internasional terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia

LAIN-LAIN:

UU No. 12 Thn 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 12 Thn 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

UU No. 21 Thn 1997 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 20 Thn 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

UU No. 6 Thn 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

UU No. 7 Thn 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

UU No. 8 Thn 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai.



Lampiran 1 - *Output* Hasil Regresi Model Untuk Total Pajak

Dependent Variable: LOG(TOTAL)

Method: Least Squares

Date: 01/03/10 Time: 12:43

Sample: 1984 2007

Included observations: 24

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-21.08266	3.109484	-6.780116	0.0000
LOG(PDB)	1.307346	0.390452	3.348293	0.0036
LOG(KURS)	1.022551	0.075697	13.50843	0.0000
LOG(IMPOR)	0.680464	0.157946	4.308215	0.0004
INFLASI	-0.011491	0.003012	-3.815570	0.0013
D1	-0.570179	0.140294	-4.064177	0.0007
R-squared	0.994215	Mean dependent var	10.71855	
Adjusted R-squared	0.992608	S.D. dependent var	1.466283	
S.E. of regression	0.126066	Akaike info criterion	-1.091702	
Sum squared resid	0.286068	Schwarz criterion	-0.797189	
Log likelihood	19.10043	F-statistic	618.6952	
Durbin-Watson stat	1.846425	Prob(F-statistic)	0.000000	

Lampiran 2 - *Output* Hasil Regresi Untuk PPh

Dependent Variable: LOG(PPH)
 Method: Least Squares
 Date: 01/03/10 Time: 12:26
 Sample: 1984 2007
 Included observations: 24

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-23.25161	3.126198	-7.437663	0.0000
LOG(PDB)	1.410352	0.391968	3.598129	0.0021
LOG(KURS)	1.029919	0.067623	15.23038	0.0000
LOG(IMPOR)	0.701466	0.160262	4.377009	0.0004
IR	-0.010115	0.003272	-3.091537	0.0063
D1	-0.461405	0.135134	-3.414426	0.0031
R-squared	0.994852	Mean dependent var	10.07851	
Adjusted R-squared	0.993422	S.D. dependent var	1.559354	
S.E. of regression	0.126468	Akaike info criterion	-1.085332	
Sum squared resid	0.287896	Schwarz criterion	-0.790819	
Log likelihood	19.02398	F-statistic	695.7324	
Durbin-Watson stat	1.885566	Prob(F-statistic)	0.000000	

Lampiran 3 - *Output* Hasil Regresi Untuk PPN

Dependent Variable: LOG(PPN)

Method: Least Squares

Date: 01/03/10 Time: 12:28

Sample: 1984 2007

Included observations: 24

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-32.59881	3.139889	-10.38216	0.0000
LOG(PDB)	2.881237	0.306557	9.398706	0.0000
LOG(KURS)	0.725393	0.122427	5.925108	0.0000
INFLASI	-0.012955	0.005470	-2.368359	0.0286
D1	-0.561569	0.255297	-2.199668	0.0404
R-squared	0.976576	Mean dependent var	9.834933	
Adjusted R-squared	0.971645	S.D. dependent var	1.363001	
S.E. of regression	0.229515	Akaike info criterion	0.077357	
Sum squared resid	1.000867	Schwarz criterion	0.322784	
Log likelihood	4.071721	F-statistic	198.0357	
Durbin-Watson stat	1.007476	Prob(F-statistic)	0.000000	

Lampiran 4 - *Output* Hasil Regresi Untuk PBB

Dependent Variable: LOG(PBB)
 Method: Least Squares
 Date: 01/03/10 Time: 12:32
 Sample: 1984 2007
 Included observations: 24

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-37.90736	1.973214	-19.21097	0.0000
LOG(PDB)	2.987219	0.190783	15.65769	0.0000
LOG(KURS)	0.639961	0.069173	9.251535	0.0000
LOG(HARGA)	0.751645	0.078679	9.553303	0.0000
D1	-0.476330	0.152871	-3.115892	0.0057
R-squared	0.992841	Mean dependent var	7.671767	
Adjusted R-squared	0.991334	S.D. dependent var	1.557143	
S.E. of regression	0.144956	Akaike info criterion	-0.841722	
Sum squared resid	0.399232	Schwarz criterion	-0.596294	
Log likelihood	15.10066	F-statistic	658.7684	
Durbin-Watson stat	1.112518	Prob(F-statistic)	0.000000	

Lampiran 5 – Hasil Pengujian LM Test untuk Total Pajak

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	1.816487	Probability	0.194568
Obs*R-squared	4.441069	Probability	0.108551

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 01/15/10 Time: 07:46

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.392087	3.320737	0.720348	0.4817
LOG(PDB)	-0.327707	0.424655	-0.771702	0.4515
LOG(KURS)	0.014895	0.073591	0.202397	0.8422
LOG(IMPOR)	0.162298	0.180022	0.901547	0.3807
INFLASI	-0.000891	0.002937	-0.303254	0.7656
D1	-0.003238	0.134583	-0.024060	0.9811
RESID(-1)	-0.241438	0.269907	-0.894522	0.3843
RESID(-2)	-0.531576	0.281820	-1.886225	0.0776
R-squared	0.185045	Mean dependent var	4.43E-15	
Adjusted R-squared	-0.171498	S.D. dependent var	0.111525	
S.E. of regression	0.120710	Akaike info criterion	-1.129657	
Sum squared resid	0.233133	Schwarz criterion	-0.736973	
Log likelihood	21.55589	F-statistic	0.518996	
Durbin-Watson stat	1.718284	Prob(F-statistic)	0.807422	

Lampiran 6 – Hasil Pengujian *White Heteroscedasticity* Untuk Total Pajak

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	3.267662	Probability	0.023340
Obs*R-squared	16.25966	Probability	0.061653

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 01/15/10 Time: 07:49

Sample: 1984 2007

Included observations: 24

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	16.94215	13.59322	1.246368	0.2331
LOG(PDB)	-2.605483	2.442675	-1.066651	0.3042
(LOG(PDB))^2	0.103487	0.095646	1.081976	0.2975
LOG(KURS)	-0.435883	0.324573	-1.342942	0.2007
(LOG(KURS))^2	0.025929	0.019185	1.351534	0.1980
LOG(IMPOR)	0.248565	0.278601	0.892192	0.3874
(LOG(IMPOR))^2	-0.012075	0.013470	-0.896415	0.3852
INFLASI	-0.000537	0.002124	-0.252717	0.8042
INFLASI^2	5.47E-06	3.13E-05	0.174856	0.8637
D1	-0.007761	0.018140	-0.427857	0.6753
R-squared	0.677486	Mean dependent var	0.011920	
Adjusted R-squared	0.470155	S.D. dependent var	0.015871	
S.E. of regression	0.011553	Akaike info criterion	-5.789438	
Sum squared resid	0.001869	Schwarz criterion	-5.298583	
Log likelihood	79.47326	F-statistic	3.267662	
Durbin-Watson stat	2.681173	Prob(F-statistic)	0.023340	

Lampiran 7 - Hasil Pengujian LM Test Untuk PPh

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	2.688542	Probability	0.098485
Obs*R-squared	6.036839	Probability	0.048878

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 01/15/10 Time: 07:33

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.111368	2.969047	0.037510	0.9705
LOG(PDB)	0.006316	0.371873	0.016985	0.9867
LOG(KURS)	0.016096	0.063855	0.252070	0.8042
LOG(IMPOR)	-0.027129	0.150896	-0.179785	0.8596
IR	-0.002534	0.003197	-0.792605	0.4396
D1	-0.071512	0.131284	-0.544711	0.5935
RESID(-1)	0.083577	0.233477	0.357968	0.7250
RESID(-2)	-0.553595	0.239688	-2.309652	0.0346
R-squared	0.251535	Mean dependent var	-3.23E-15	
Adjusted R-squared	-0.075919	S.D. dependent var	0.111880	
S.E. of regression	0.116050	Akaike info criterion	-1.208396	
Sum squared resid	0.215480	Schwarz criterion	-0.815711	
Log likelihood	22.50075	F-statistic	0.768155	
Durbin-Watson stat	2.090969	Prob(F-statistic)	0.621822	

Lampiran 8 - Hasil Pengujian *White Heteroscedasticity* Untuk PPh

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	3.267662	Probability	0.023340
Obs*R-squared	16.25966	Probability	0.061653

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 01/15/10 Time: 07:51

Sample: 1984 2007

Included observations: 24

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	16.94215	13.59322	1.246368	0.2331
LOG(PDB)	-2.605483	2.442675	-1.066651	0.3042
(LOG(PDB))^2	0.103487	0.095646	1.081976	0.2975
LOG(KURS)	-0.435883	0.324573	-1.342942	0.2007
(LOG(KURS))^2	0.025929	0.019185	1.351534	0.1980
LOG(IMPOR)	0.248565	0.278601	0.892192	0.3874
(LOG(IMPOR))^2	-0.012075	0.013470	-0.896415	0.3852
INFLASI	-0.000537	0.002124	-0.252717	0.8042
INFLASI^2	5.47E-06	3.13E-05	0.174856	0.8637
D1	-0.007761	0.018140	-0.427857	0.6753
R-squared	0.677486	Mean dependent var	0.011920	
Adjusted R-squared	0.470155	S.D. dependent var	0.015871	
S.E. of regression	0.011553	Akaike info criterion	-5.789438	
Sum squared resid	0.001869	Schwarz criterion	-5.298583	
Log likelihood	79.47326	F-statistic	3.267662	
Durbin-Watson stat	2.681173	Prob(F-statistic)	0.023340	

Lampiran 9 - Hasil Pengujian LM Test Untuk PPN

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	2.100135	Probability	0.153078
Obs*R-squared	4.754962	Probability	0.092784

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 01/15/10 Time: 07:54

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.181897	3.079941	0.383740	0.7059
LOG(PDB)	-0.130886	0.304847	-0.429348	0.6731
LOG(KURS)	0.057458	0.125364	0.458328	0.6525
INFLASI	0.002332	0.005341	0.436571	0.6679
D1	0.143410	0.265988	0.539161	0.5968
RESID(-1)	0.401160	0.273385	1.467384	0.1605
RESID(-2)	0.335613	0.288421	1.163621	0.2607
R-squared	0.198123	Mean dependent var		2.31E-15
Adjusted R-squared	-0.084892	S.D. dependent var		0.208605
S.E. of regression	0.217279	Akaike info criterion		0.023223
Sum squared resid	0.802572	Schwarz criterion		0.366822
Log likelihood	6.721328	F-statistic		0.700045
Durbin-Watson stat	1.664637	Prob(F-statistic)		0.653474

Lampiran 10 - Hasil Pengujian *White Heteroscedasticity* Untuk PPN

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	1.199071	Probability	0.357741
Obs*R-squared	8.258097	Probability	0.310386

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 01/15/10 Time: 07:57

Sample: 1984 2007

Included observations: 24

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	48.17421	52.04221	0.925676	0.3684
LOG(PDB)	-7.226981	8.949175	-0.807558	0.4312
(LOG(PDB))^2	0.285918	0.350858	0.814912	0.4271
LOG(KURS)	-0.598409	1.497268	-0.399667	0.6947
(LOG(KURS))^2	0.034701	0.088808	0.390739	0.7011
INFLASI	0.007877	0.009737	0.808973	0.4304
INFLASI^2	-0.000120	0.000145	-0.827508	0.4201
D1	0.020894	0.084899	0.246108	0.8087
R-squared	0.344087	Mean dependent var	0.041703	
Adjusted R-squared	0.057126	S.D. dependent var	0.059788	
S.E. of regression	0.058055	Akaike info criterion	-2.593635	
Sum squared resid	0.053927	Schwarz criterion	-2.200951	
Log likelihood	39.12362	F-statistic	1.199071	
Durbin-Watson stat	1.462665	Prob(F-statistic)	0.357741	

Lampiran 11 - Hasil Pengujian LM Test Untuk PBB

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	2.824745	Probability	0.087261
Obs*R-squared	5.986349	Probability	0.050128

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 01/15/10 Time: 07:59

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.739635	2.269291	0.325932	0.7485
LOG(PDB)	-0.076173	0.224715	-0.338974	0.7388
LOG(KURS)	0.040126	0.089748	0.447094	0.6605
LOG(HARGA)	-0.030540	0.077822	-0.392430	0.6996
D1	-0.028097	0.142744	-0.196835	0.8463
RESID(-1)	0.577868	0.246292	2.346273	0.0313
RESID(-2)	-0.198305	0.295559	-0.670949	0.5113
R-squared	0.249431	Mean dependent var		1.38E-14
Adjusted R-squared	-0.015475	S.D. dependent var		0.131749
S.E. of regression	0.132765	Akaike info criterion		-0.961979
Sum squared resid	0.299651	Schwarz criterion		-0.618380
Log likelihood	18.54375	F-statistic		0.941582
Durbin-Watson stat	1.951182	Prob(F-statistic)		0.491465

Lampiran 12 - Hasil Pengujian *White Heteroscedasticity* Untuk PBB

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	1.609692	Probability	0.203223
Obs*R-squared	9.917480	Probability	0.193298

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 01/15/10 Time: 08:00

Sample: 1984 2007

Included observations: 24

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	39.02900	19.83719	1.967466	0.0667
LOG(PDB)	-6.666081	3.345808	-1.992368	0.0637
(LOG(PDB))^2	0.263379	0.131402	2.004383	0.0623
LOG(KURS)	0.777398	0.511139	1.520912	0.1478
(LOG(KURS))^2	-0.047339	0.030253	-1.564759	0.1372
LOG(HARGA)	0.016068	0.144100	0.111504	0.9126
(LOG(HARGA))^2	-0.006594	0.021761	-0.303015	0.7658
D1	-0.005022	0.022963	-0.218720	0.8296
R-squared	0.413228	Mean dependent var	0.016635	
Adjusted R-squared	0.156516	S.D. dependent var	0.022057	
S.E. of regression	0.020257	Akaike info criterion	-4.699403	
Sum squared resid	0.006566	Schwarz criterion	-4.306718	
Log likelihood	64.39284	F-statistic	1.609692	
Durbin-Watson stat	2.111564	Prob(F-statistic)	0.203223	